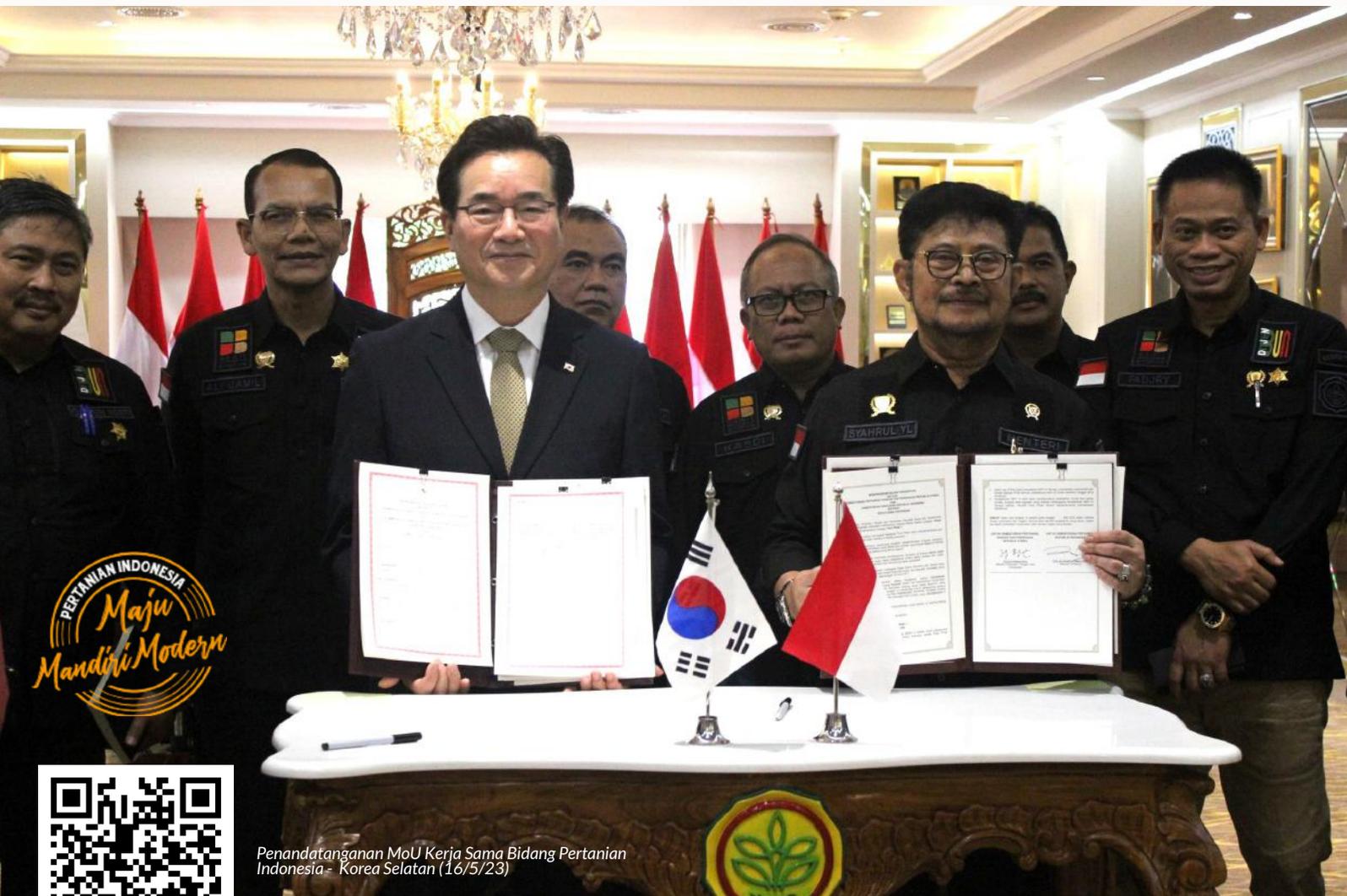




Diplomasi

BULETIN KERJA SAMA LUAR NEGERI

KEMENTERIAN PERTANIAN



Penandatanganan MoU Kerja Sama Bidang Pertanian Indonesia - Korea Selatan (16/5/23)

2

ASEAN
Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 dalam Mendukung Penguatan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

6

G20
Tindak Lanjut Kesepakatan Menteri Pertanian G20 Presidensi Indonesia dan Rangkaian Pertemuan G20 Tahun 2023 Presidensi India

10

Kunker Mentan
Penandatanganan MoU Bidang Pertanian RI-Arab Saudi dan Penguatan Kerja Sama dengan Persatuan Emirat Arab (PEA)

DAFTAR ISI

PAGE 1

PENGANTAR

PAGE 2-5

KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN TAHUN 2023

PAGE 6-9

TINDAK LANJUT G20 INDONESIA DAN RANGKAIAN G20 INDIA

PAGE 10-13

KUNJUNGAN KERJA MENTAN KE TIMUR TENGAH

- 14-15 KOREA SELATAN Sepakat Menandatangani Perpanjangan MoU
- 16 AUSTRIA *Courtesy Call* Dubes Austria kepada Mentan RI
- 17 AUSTRALIA Pertemuan 1st IA-WGAC
- 18 NAMIBIA Pertemuan Dubes Indonesia untuk Namibia dengan Sekjen Kementan
- 19 GROW ASIA-PisAgro Pertemuan dengan Sekjen Kementan
- 20-21 IPEF Sidang Putaran ke-2 Pilar I Perdagangan
- 22 IMTGT Strategic Planning Meeting WGAA ke-16
- 23 SSTC Milestones Keterlibatan Kementan dalam Program SSTC
- 24-25 LLF Pertemuan dengan Kementan RI
- 26-27 FAO Update Perkembangan Kerja Sama
- 28-29 Perkembangan Forum Komoditi
- 30-33 PHLN Perkembangan Kegiatan
- 34 Sistem Peringatan Dini SIPOR PHLN
- 35 GEF Peluang Pendanaan Proyek
- 36 Diseminasi Kebijakan dan Kerja Sama Forum Multilateral 2022-2023
- 37 Info PDLN

PAGE 38-41

KEGIATAN ATASE PERTANIAN

PAGE 42-48

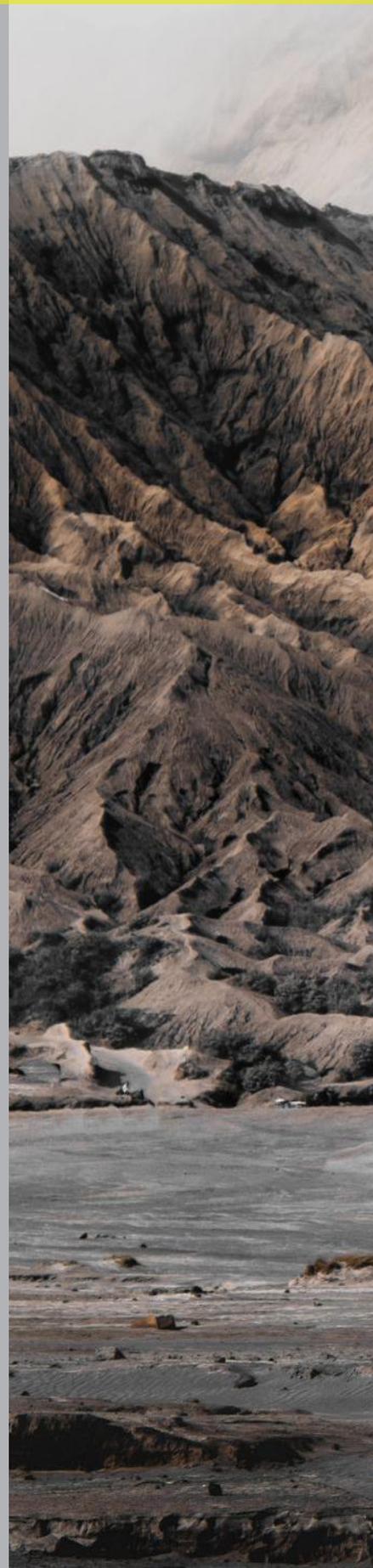
KOLOM ANJAK KLN

PAGE 49

SPI BIRO KLN

PAGE 50

AGENDA KERJA SAMA LN 2023



Pengantar

Kementerian Pertanian melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri terus mengupayakan untuk mendorong program prioritas ekspor tiga kali lipat (GRATIEKS) melalui fasilitasi akselerasi ekspor komoditas pertanian dan mobilisasi investasi dengan pihak asing untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan sektor pertanian Indonesia.

Mengawali tahun 2023, Menteri Pertanian RI menandatangani dua MoU Kerja Sama dengan Arab Saudi dan Korea Selatan, untuk mendorong kerja sama teknis pertanian, fasilitasi akses pasar komoditas pertanian dan peningkatan investasi usaha pertanian. Mentan juga menerima *courtesy call* dari negara mitra diantaranya Austria, sebagai upaya memperkuat kerja sama di bidang peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan penguatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian.

Dari aspek kerja sama regional dan multilateral, melanjutkan keberhasilan Presidensi G20 Indonesia, Kementan aktif memimpin forum pertemuan sektor pertanian pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ini, serta negosiasi klaster pertanian pada pilar perdagangan di forum *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity*. Seluruh kegiatan terangkum dalam Buletin Diplomasi edisi XI/2023, yang diharapkan berkontribusi dalam pencapaian pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern.



Dr. Ade Candradijaya
Kepala Biro Kerja Sama
Luar Negeri, Setjen

Tim Redaksi

Pengarah: Dr. Ade Candradijaya **Penanggungjawab:** Dr. Rina Suprihati **Editor:** Yurika A. Permanasari **Anggota:** Rismawan Farid | Munawar | Linda Purwaningrat | Intan Dwi J | Rina Puspitasari | Raden Diky Subiyanto | Annisa Handayani | Irene Lamria
Email: publikasi.kln@gmail.com, **Facebook:** KLN Pertanian

KEKETUAAN INDONESIA DI ASEAN TAHUN 2023

Sejak tongkat estafet Ketetuaan ASEAN diserahkan Kamboja kepada Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Phnom Penh November 2022, Indonesia resmi memegang tampuk ketetuaan ASEAN. Tugas itu akan diemban Indonesia selama satu tahun, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023.

Visi Ketetuaan ASEAN Indonesia Tahun 2023 diarahkan untuk membangun ASEAN yang mampu berketahanan, adaptif, dan inklusif. Terdapat dua elemen besar dalam makna tema Ketetuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 yaitu "**ASEAN Matters**", terkait bagaimana Indonesia dan ketetuaannya tetap menjadikan ASEAN relevan dan penting tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, melainkan juga masyarakat ASEAN dan di luar kawasan.

Tema kedua yaitu, "**Epicentrum of Growth**", di mana Indonesia ingin lebih mengcapitalisasi posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia.



**PRIORITAS KETETUAAN
INDONESIA DI ASEAN
TAHUN 2023
DALAM MENDUKUNG
PENGUATAN SEKTOR
PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN**



Secara khusus Presiden RI, Joko Widodo, memberikan arahan agar Indonesia dapat memimpin ASEAN dalam merespon masalah dan tantangan yang timbul di kawasan, khususnya krisis pangan dan energi dengan tetap menjaga sentralitas, mampu memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat, dan berkontribusi signifikan dalam penanganan krisis multidimensi global. ASEAN diharapkan menjadi lokomotif stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan.

Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri selaku Koordinator Persiapan Keketuaan Indonesia di ASEAN meminta *National Focal Point* (NFP) forum-forum terkait di ASEAN untuk menyusun usulan *Priority Economic Deliverables* (PED) sebagai rencana capaian Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Kementerian Pertanian RI merupakan NFP ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry* (AMAF). *ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises* merupakan salah satu dari 16 (enam belas) *Priority Economic Deliverables* (PED) yang diusulkan Indonesia pada Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023.

Concept Note "ASEAN Leader's Declaration on Strengthening Food Security" telah diadopsi pada pertemuan AMAF ke-44 tanggal 26 Oktober 2022.

Selain itu, AMAF telah menugaskan Forum ASEAN *Food Security Reserve Board* (AFSRB) sebagai badan sektoral di bawah AMAF untuk memfinalisasikan dan menyampaikan konsep Deklarasi dan melaporkan kembali hasilnya kepada *Senior Officials Meeting* AMAF (SOM-AMAF).



Perwakilan ASEAN Member States pada ASEAN Conference on Strengthening Food Security Integration (17/4/23)

ASEAN CONFERENCE ON STRENGTHENING FOOD SECURITY INTEGRATION

Sebagai tindak lanjut adopsi *Concept Note "ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security"* pada pertemuan AMAF ke-44 tahun 2022, Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian, selaku Ketua SOM-AMAF Indonesia, Kasdi Subagyo, telah membuka pertemuan *ASEAN Conference on Strengthening Food Security Integration* yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2023 di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Pertemuan dilakukan guna membahas *zero draft ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises* yang menitikberatkan pada upaya ASEAN dalam menjawab tantangan ketahanan pangan khususnya di saat krisis yang disebabkan oleh perubahan iklim, pandemi Covid-19, dan ketegangan geopolitik, serta meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi ancaman tidak terduga lainnya di masa mendatang.

Deklarasi juga akan menekankan pentingnya kerja sama dengan negara mitra ASEAN untuk

bersama-sama mendukung pemenuhan dan ketersediaan pasokan pangan dan pertanian yang diselaraskan dengan capaian pada deklarasi G20 dalam upaya pemetaan wilayah kerawanan pangan (*mapping exercises on food insecurity*), konektivitas antara *ASEAN Food Security Information System (AFSIS)* dengan *Agricultural Market Information System (AMIS)* sebagai peringatan dini akan potensi terjadinya krisis pangan di kawasan.

Konferensi melibatkan lintas sektor diantaranya AMAF, *ASEAN Economic Ministers (AEM)*, dan *ASEAN Transport Ministers (ATM)*. Di samping itu, pihak *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* juga turut mendukung proses penyusunan *draft* deklarasi tersebut.

Mengawali sambutannya, Sekjen Kementan selaku Ketua SOM-AMAF Indonesia, menekankan pentingnya pencapaian ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan bagi setiap individu untuk menjalani hidup sehat yang aktif dan produktif.



Assistant Director, Sectoral Development Directorate ASEAN Secretariat, Dr. Pham uang Minh (kiri), Prof Dr Achmad Suryana (tengah) dan Kepala Biro KLN Kementan Ade Candradijaya (kanan) pada sesi ASEAN Conference on Strengthening Food Security Integration (17/4/23)

Namun, tujuan tersebut terhambat, mulai dari perubahan terkait iklim dan lingkungan, munculnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, hingga ketegangan geopolitik di berbagai wilayah, telah memperburuk kerentanan sistem pangan global saat ini. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman krisis pangan yang diperkirakan akan berkepanjangan dan meluas secara global.

Isu ketahanan pangan telah dibahas secara parsial dan/atau terpisah di beberapa badan sektoral ASEAN. Dari sisi ketersediaan dan produksi pangan, hal ini secara intensif dibahas pada forum ASEAN *Ministers on Agriculture and Forestry* (AMAF). Namun demikian, penguatan ketahanan merupakan isu holistik dan tidak dapat hanya mengandalkan sisi produksi, namun penguatan sistem distribusi dan regulasi perdagangan untuk menjamin kelancaran arus barang menjadi krusial. Hal ini membutuhkan kerja sama dan sinergi antara seluruh pemangku

kepentingan di ASEAN, khususnya pilar ekonomi.

Guna menyatukan peran seluruh sektor terkait ini diperlukan komitmen level pimpinan tertinggi yang akan dituangkan melalui ASEAN *Leaders' Declaration*. Deklarasi dimaksud akan memperkuat dorongan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai urgensi membangun mekanisme penguatan ketahanan pangan, memperkuat rantai pasokan regional, dan pertanian yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Deklarasi tersebut akan mengambil langkah praktis dan konkret dalam menyatukan peran semua sektor terkait dalam memperkuat dan memastikan ketahanan pangan dalam menghadapi krisis pangan regional.

ASEAN *Conference on Strengthening Food Security Integration* yang melibatkan seluruh *stakeholders* dari forum pertanian, perdagangan, transportasi dan keuangan di ASEAN, mitra dialog ASEAN, organisasi internasional, dan

akademia ini ditujukan untuk menjangkau masukan.

Hasil dari *Conference* ini akan disampaikan dan dibahas pada pertemuan AFSRB bulan Juni 2023 untuk kemudian disampaikan kepada SOM-AMAF *Leaders* guna mendapatkan persetujuan AMAF, AEM dan ATM secara *ad-referendum* sebelum mendapatkan pengesahan lebih lanjut pada ASEAN *Summit* bulan September 2023 mendatang.

Final *draft* Deklarasi ini secara paralel akan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan arahan lebih lanjut dan melaporkannya kepada Presiden RI.

Deklarasi ini ditargetkan akan menjadi capaian penting dan menjadi salah satu *key deliverables* Keketuaan ASEAN Indonesia dalam pertemuan ASEAN *Summit* bulan September 2023 mendatang.

HASILKAN BALI LEADERS' DECLARATION, INDONESIA SUKSES SELENGGARAKAN KTT G20

Sebagai presidensi G20, Indonesia mengupayakan berbagai solusi terbaik selama satu tahun kepemimpinan di tengah berbagai krisis dan tantangan baru yang muncul. Indonesia sukses menghasilkan *Leaders' Declaration* dan *concrete deliverables* yang tertuang dalam daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan, yang diadopsi dan disahkan pada KTT G20 Bali. Dalam *Leaders' Declaration*, isu pertanian dibahas dalam 3 paragraf yang mendeskripsikan 3 isu prioritas *Agriculture Working Group* yaitu (i) membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan; (ii) mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, adil, transparan, dapat diprediksi dan non-diskriminatif; dan (iii) kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk meningkatkan penghidupan petani di pedesaan.

Rangkaian KTT G20 turut diwarnai dengan *side event Global Food Security Forum* yang diselenggarakan oleh *Atlantic Council*, berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi tanggal 12-13 November 2022 di Hotel Sofitel Nusa Dua. Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo hadir sebagai salah satu narasumber pada sesi kedua (13/11/2022) dan berbagi pengalaman terkait keberhasilan Indonesia dalam membangun sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan serta poin-poin penting hasil pertemuan *Agriculture Ministers' Meeting (AMM) G20* Presidensi Indonesia.



Penyerahan secara simbolis presidensi G20 dari Indonesia kepada India (16/11/22)



Mentan RI Syahrul Yasin Limpo bersama Gen. Wesley Clark side event G20 Global Food Security Forum (13/11/22)

Presiden RI Joko Widodo telah menyerahkan palu kepemimpinan Presidensi G20 secara simbolis kepada Perdana Menteri India Narendra Modi di akhir pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan tanggal 15-16 November 2022 di Bali.

Pertemuan tersebut menjadi puncak seluruh rangkaian G20 Presidensi Indonesia dan dihadiri oleh para pemimpin dan perwakilan pejabat tinggi dari 20 anggota G20 dan negara undangan serta para pemimpin dari organisasi internasional.

Dengan diserahkannya tongkat estafet kepemimpinan Presidensi G20 kepada India, maka berakhir pula masa kepemimpinan Indonesia. Capaian hasil-hasil kesepakatan pada Presidensi G20 Indonesia 2022, termasuk *Chairs' Summary AWG* menjadi preseden penting bagi India selaku Presidensi G20 tahun 2023. Sebagai bagian dari Troika, Indonesia berkepentingan untuk memastikan hasil G20 Indonesia ditindaklanjuti oleh Presidensi India.



HASIL KONKRET G20 INDONESIA

1

**Terbentuknya
Pandemic Fund.**
Telah terkumpul
1,5 miliar USD.

2

**Pembentukan dan
operasionalisasi *resilience
and sustainability trust***
di bawah IMF sejumlah
81,6 miliar USD untuk
membantu negara-negara
menghadapi krisis.

3

Mekanisme transisi energi,
khususnya untuk Indonesia
memperoleh komitmen dari
Just Energy Transition
Partnership sebesar
20 miliar USD.

4

**Komitmen bersama 30%
daratan dunia dan 30%
lautan dunia dilindungi di
tahun 2030 dan melanjutkan
komitmen mengurangi
degradasi tanah sampai 50%
tahun 2040 secara sukarela.**

Disampaikan dalam pernyataan pers di *media center*
di Bali International Convention Center, Bali (17/11/2022)



Manfaat Ekonomi Presidensi G20 Indonesia

Tahun 2022

1

Secara agregat, manfaat ekonomi G20 Indonesia >1,5-2 kali dibanding *Annual Meeting* IMF-World Bank 2018 di Bali

2

Kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 533 juta dolar AS atau setara Rp7,4 triliun

3

Peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun

4

Menyerap tenaga kerja hingga 33 ribu orang

5

Peningkatan wisatawan mancanegara 1,8-3,6 juta orang

6

Peningkatan lapangan kerja sebanyak 600-700 ribu



RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER

Sumber : Media Center G20 Indonesia
Gambar : g20.org

TINDAK LANJUT AWG G20 PRESIDENSI INDONESIA



1

Membangun sistem pertanian dan pangan (SPP)
Tangguh dan Berkelanjutan

A. Produksi pangan yang berkualitas dan bernutrisi tinggi

- Peningkatan produksi ternak perkebunan (Ditjen. Perkebunan)
- Pengembangan padi, jagung dan kedelai (Ditjen. TP)
- Penanganan DPI dan pengendalian OPT (Ditjen. TP)
- Peningkatan produksi sayuran, buah dan florikultur (Ditjen. Hortikultura)

B. Optimalisasi peran teknologi

- Peningkatan produksi ternak serta peningkatan mutu dan keamanan produk hewan (Ditjen. PKH)
- Bantuan sarana dan pengolahan dan pemasaran hasil ternak (Ditjen. PKH)
- Penerapan standardisasi pertanian (BSIP)

C. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk menjamin inklusivitas

- Program wirausaha muda pertanian serta bimtek penyuluh dan petani (BPPSDMP)

2

Mendorong terciptanya perdagangan pangan yang terbuka, transparan dan dapat diprediksi untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi semua.

A. Mendorong kebijakan perdagangan pangan yang lebih terbuka, predictable dan transparan

- Akses ke lembaga pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor produk ternak (Ditjen. PKH)
- Program Gratiexs (Barantan)

B. Penguatan jaringan rantai pasok pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian

- Uji mutu, sertifikasi dan pemasaran komoditas pangan (Ditjen. TP)
- Pasca panen, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan (Ditjen. Perkebunan)
- Akselerasi rantai nilai tambah hortikultura (Ditjen. Horti)

C. Penguatan sistem informasi pasar pertanian dan pangan

- Informasi pasar hortikultura (Ditjen. Hortikultura)
- Pengembangan sistem informasi pertanian (PUSDATIN)

3

Mendorong kewirausahaan pertanian yang inovatif melalui pertanian digital untuk perbaikan penghidupan para petani di wilayah perdesaan

A. Peningkatan kapasitas digital dan akses petani skala kecil terhadap input produksi dan kemudahan akses pasar

- Pengembangan AWR (PUSDATIN)
- Pengembangan UMKM Pertanian (Ditjen. Hortikultura)
- Bimtek petani dan penyuluh (BPPSDMP)
- Model Pertanian Presisi (Ditjen. PSP)
- Akses ke lembaga pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor produk ternak (Ditjen. PSP)
- Bantuan TR2, TR 4, Cultivator, Hand sprayer, combine harvester, pompa air (Ditjen. PSP)
- Fasilitas pembiayaan KUR (Ditjen. PSP)



Sekjen Kementan Kasdi Subgyono selaku Agriculture Deputy G20 Indonesia menyampaikan country statement pada pertemuan ADM-1 (13/2/23)



Foto rangkaian kegiatan Sekjen Kementan selaku Agriculture Deputy G20 Indonesia saat hadir di sesi ke-1 ADM G20

THE 1ST AGRICULTURE DEPUTIES MEETING (ADM-1) G20 PRESIDENSI INDIA 2023

Rangkaian pertemuan *Agriculture Working Group (AWG)* Presidensi India tahun 2023 diawali pertemuan *Agriculture Deputies Meeting (ADM)* ke-1 tanggal 13-15 Februari 2023 di Indore, India. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI, Kasdi Subagyono, sebagai *focal point* Pemerintah Indonesia untuk G20 AWG.

Pertemuan dibuka oleh *Chief Minister* Madhya Pradesh dan *Co-Chair AWG* Shri Manoj Ahuja dari *Union Agriculture Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*, yang menyampaikan empat agenda prioritas AWG Presidensi G20 India, yaitu : (i) *Food Security and Nutrition*; (ii) *Sustainable agriculture with climate-smart agriculture*; (iii) *Inclusive Agrifood Value Chains and Food Systems*; and (iv) *Digitalization for Agricultural Transformation*.

Pada pertemuan, negara anggota G20, negara undangan maupun organisasi internasional mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan intervensi secara umum atas *issue note* AWG India, dimana Indonesia dan Brazil sebagai troika mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan intervensinya. Indonesia secara prinsip mendukung dan mengapresiasi India yang telah membawa isu prioritas Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 ke dalam Presidensi G20 India Tahun 2023 dan mengelaborasinya menjadi usulan aksi nyata dalam mewujudkan transformasi *agrifood systems* yang tangguh dan berkelanjutan.



Kepala Biro KLN Kementan Ade Candradijaya, bersama Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Sudi Mardianto, mewakili Indonesia pada sesi ke-2 ADM G20 (29/3/23)

THE 2ND AGRICULTURE DEPUTIES MEETING (ADM-2) G20 PRESIDENSI INDIA 2023

Pertemuan ke-2 ADM Presidensi India telah dilaksanakan pada tanggal 29-31 Maret 2023 di Chandigarh, India, untuk membahas *first draft communique* yang meliputi 4 (empat) isu prioritas AWG Presidensi G20 India serta membahas 2 inisiasi *concrete deliverables*, yaitu (i) *Millets and OtHer Ancient GRains International ReSearch Initiative (MAHARISHI)* dan (ii) *G20 Food Security and Nutrition Framework 2023*.

Proses pembahasan paragraf (*drafting*) *communique* berjalan dinamis, dimana setiap negara anggota G20 menyampaikan pandangan dan masukan terhadap setiap paragraf. Secara keseluruhan cakupan substansi dalam *draft Communique* AWG Presidensi India masih sejalan dengan substansi *Chair Summary* AWG Presidensi Indonesia, yaitu memastikan kecukupan pangan bagi semua melalui (i) transformasi *Agri-food Systems toward greater resilience and sustainability* domestik masing-masing negara G20 dan (ii) memastikan system perdagangan pangan global yang "*rules-based, open, fair, predictable, transparent, non-discriminatory, inclusive, and equitable*".

Pembahasan *first draf communique* belum sampai pada keputusan final dan akan dilanjutkan pada pertemuan ADM-3 untuk mendapatkan konsensus sebelum pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri Pertanian G20 di bulan Juni 2023.



4 PRIORITY ISSUES OF AWG UNDER INDIA'S G20 PRESIDENCY

| | |
|---|--|
| 1 | Food Security and Nutrition |
| 2 | Sustainability agriculture with a-smart agriculture |
| 3 | Inclusive Agrifood Value Chain and Food Systems |
| 4 | Digitalization for Agricultural Transformation |

AWG MEETINGS UNDER INDIA'S G20 PRESIDENCY



Source: <https://agricoop.gov.in/awg-g20/>



Mentan RI Syahrul Yasin Limpo, melakukan penandatanganan MoU bidang pertanian didampingi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, dan Direktur Jenderal PSP Ali Jamil dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi (2/1/23)

PENANDATANGANAN MOU BIDANG PERTANIAN INDONESIA-ARAB SAUDI

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) bidang pertanian dalam agenda kunjungan kerja Menteri Pertanian RI di Arab Saudi pada 2 Januari 2023.

MoU bidang pertanian ini ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan, Air dan Pertanian, Arab Saudi, Y.M. Eng. Abdulrahman A. Alfadley.

Cakupan kerja sama dalam MoU meliputi kerja sama teknis pertanian, keamanan pangan, modernisasi teknologi pertanian, fasilitasi akses pasar komoditas pertanian kedua negara, dan peningkatan investasi usaha pertanian. MoU ini diharapkan semakin memperkuat kerja sama yang terjalin erat hingga kini.

Pada kesempatan tersebut, juga dijajaki inisiasi kerja sama investasi penyulingan air laut untuk membantu menjamin ketersediaan air di sektor pertanian dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Pemerintah Arab Saudi dinilai telah berhasil mengembangkan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk irigasi pertanian.

Pemerintah Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menerapkan teknologi yang sama dalam pemanfaatan air laut di wilayah pesisir dan mengharapkan Arab Saudi dapat mengembangkan teknologi desalinasi tersebut di Indonesia melalui skema investasi.

NERACA PERDAGANGAN

INDONESIA - SAUDI ARABIA

TAHUN 2022



1950

Hubungan diplomatik RI-Kerajaan Arab Saudi dimulai pada 1 Mei 1950 yang ditandai dengan pembukaan Perwakilan RI di Jeddah

2023

Memorandum of Understanding (MoU) bidang pertanian RI - Kerajaan Arab Saudi

INDONESIA SURPLUS

425,7 JUTA USD

TOTAL NILAI PERDAGANGAN

488,8 JUTA USD

TOP 3 KOMODITAS EKSPOR INDONESIA



KELAPA SAWIT
305,5 JUTA USD



DAGING UNGGAS
69,6 JUTA USD



KELAPA
36,5 JUTA USD

TOP 3 KOMODITAS IMPOR INDONESIA



KULIT
14,7 JUTA USD



KURMA
11,6 JUTA USD



MADU
4,9 JUTA USD

Indonesia memiliki stok produksi beras yang mencukupi untuk bisa dilakukan ekspor. Sehingga kita harus bisa mengambil peluang, agar ekspor beras ke Arab Saudi tidak hanya didominasi Vietnam dan Thailand.

Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian RI



Pemerintah Indonesia membuka peluang seluas - luasnya bagi masuknya investasi dari Arab Saudi terutama di sektor pengairan, pangan dan pertanian. Pemri juga siap memberikan dukungan iklim investasi yang kondusif serta sejumlah insentif bagi investor Arab Saudi yang berminat untuk berinvestasi di Indonesia sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Indonesia juga mengharapkan fasilitasi pembukaan akses pasar beras asal Indonesia khususnya beras jenis premium dan khusus. Sejumlah importir Arab Saudi telah menyampaikan minatnya untuk mengimpor beras dari Indonesia.

Dalam hal ini, upaya konkret telah dilakukan melalui pertemuan dengan Duta Besar RI, Konsul Jenderal RI, dan Diaspora Indonesia di Arab Saudi, yang menghasilkan komitmen bersama dalam upaya peningkatan nilai ekspor komoditas pangan dan pertanian Indonesia ke Arab Saudi, khususnya untuk pasokan kebutuhan pangan bagi jemaah Haji dan Umrah yang berasal dari Indonesia.

Di samping itu, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengisi pasar produk olahan unggas di Arab Saudi karena memiliki status kesehatan hewan dan akreditasi standar rumah potong hewan yang baik.

Selama ini produk peternakan Indonesia (olahan unggas) mampu menembus pasar Jepang, Myanmar, Benin, PNG dan Timor Leste dan sudah mendapatkan persetujuan ekspor dari Uni Emirat Arab (UEA).

Berkaitan dengan kinerja perdagangan produk pertanian kedua negara, Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang utama produk pertanian bagi Indonesia. Sepanjang tahun 2022 ekspor produk pertanian Indonesia ke Arab Saudi tercatat sebesar USD 457,3 juta sedangkan impor Indonesia dari Arab Saudi tercatat sebesar USD 31,5 juta.

Presiden RI, Joko Widodo, juga berkeinginan untuk menjajaki peluang akses pasar produk pertanian unggulan Indonesia yang lebih beragam, seperti kopi, buah tropis, dan produk-produk hortikultura dan rempah-rempah (lada, cengkeh). Untuk itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan potensi perdagangan produk pertanian Indonesia ke Arab Saudi perlu terus ditingkatkan.

RANGKAIAN KUNJUNGAN KERJA MENTERI PERTANIAN KE UNI EMIRAT ARAB (UEA)

Indonesia dan UEA telah menandatangani payung kerja sama bilateral dalam bentuk MoU Bidang Pertanian dan Diversifikasi Pangan pada kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di tahun 2020. MoU tersebut menghasilkan kerja sama konkret di bidang pertanian melalui pembentukan forum kerja sama pertanian (*Working Group on Agriculture*) dalam perumusan dan pengimplementasian kerja sama strategis, serta mendorong penyelesaian hambatan perdagangan bagi kedua negara. Tahun 2022, Presiden Jokowi juga melakukan kunjungan tindak lanjut guna membahas pemanfaatan peluang investasi di sektor pertanian dan upaya perluasan akses pasar komoditas pertanian ke Timur Tengah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Pertanian RI melakukan kunjungan kerja tanggal 4-5 Januari 2023 ke Perusahaan Elite Agro LLC Group (EAG Group) dan PT. Lulu Group Retail.

Mentan juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup UEA, Y.M. Mariam Al Mheiri di Dubai. Dalam pertemuan, Menteri Al Mheiri menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan siap bekerja sama dengan Indonesia di bidang pertanian, khususnya terkait isu perubahan iklim.

Pertemuan menghasilkan komitmen untuk mendukung percepatan proses akses pasar komoditas pangan Indonesia, khususnya daging ayam. Lebih lanjut, pertemuan juga menyepakati percepatan realisasi investasi alih teknologi pertanian presisi untuk komoditas hortikultura dan tanaman pangan, khususnya beri-berian dan kedelai di Indonesia.



Pertemuan Bilateral Mentan RI Syahrul Yasin Limpo dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup UEA, Y.M. Mariam Al Mheiri (4/1/23)

Delri berkunjung ke *Al Foah Farm (High Tech Greenhouse Farming)* melihat budidaya buah-buahan dan sayuran secara organik, dari pembibitan hingga pengemasan. Selanjutnya, Delri juga berkunjung ke *Marmum Dairy Farm*, Nahel yang memproduksi produk olahan berbahan dasar susu sapi.

Kementerian Pertanian RI dan EAG sepakat memfokuskan kerja sama pada investasi industri hortikultura berteknologi modern di Indonesia. Proyek yang direncanakan adalah pengembangan *processing house* sebagai *settlement asset* di Pusat Standardisasi Instrumen Sayuran Lembang untuk mendukung *transfer of technology* secara bertahap. Saat ini, Pemerintah RI masih menunggu proposal resmi dari EAG LLC Group terkait nilai sewa dan skema pembayaran yang diinginkan oleh pihaknya.

KUNJUNGAN KERJA KE PERUSAHAAN ELITE AGRO LLC GROUP



Mentan Syahrul Yasin Limpo melakukan kunjungan kerja ke Al Foah Farm didampingi Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis (4/1/23)

Kunjungan Kerja ke Perusahaan Lulu Hypermarket (Dubai)

Kedua pihak sepakat untuk melakukan kerja sama untuk mendorong ekspor produk pertanian Indonesia dengan memperluas pemasaran komoditas pertanian Indonesia, khususnya buah dan sayuran, di seluruh gerai Lulu *Hypermarket* di Timur Tengah. Kedua pihak juga merumuskan draf Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian RI dan PT. Lulu Group Retail yang akan ditandatangani di Jakarta, dengan mengundang Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup UEA untuk menyaksikan penandatungannya.

Perkembangan Tindak Lanjut

Kementerian Pertanian RI melalui Biro KLN telah melakukan beberapa kali rapat tindak lanjut dengan EAG untuk mempercepat proses negosiasi proyek kerja sama di Pusat Standardisasi Instrumen Sayuran, BSIP, di Lembang.

Sementara ini telah dicapai kesepakatan terkait besaran sewa lahan, dan jangka waktu pelaksanaan proyek antara kedua pihak. EAG juga telah menyampaikan terkait keuntungan proyek selama dan setelah jangka waktu pelaksanaan dalam rapat tindak lanjut tersebut. Namun hingga saat ini, Kementan masih menunggu penyampaian dokumen *Business Plan* terkait detail proyek dimaksud oleh pihak EAG.

Biro KLN masih terus bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait pengajuan persetujuan harga sewa proyek EAG tersebut. Saat ini, pihak EAG masih harus melengkapi beberapa dokumen atas pemanfaatan Barang Milik Negara (lahan Kementan) dimaksud.

Secara paralel, Biro KLN telah melakukan rapat tindak lanjut pembahasan konsep *Letter of Intent* (LoI) kerja sama antara Kementan dengan PT. Lulu Group Retail pada 2 Februari 2023, dan menyepakati masih diperlukan *series of discussions* untuk membahas penyesuaian poin-poin teknis kesepakatan LoI.

NERACA PERDAGANGAN

IDN - UEA



TAHUN 2022

1976

Hubungan diplomatik resmi RI-Uni Emirat Arab

2020

Memorandum of Understanding (MoU) bidang pertanian dan diversifikasi pangan RI - Uni Emirat Arab

INDONESIA SURPLUS

349,6

JUTA USD

TOTAL PERDAGANGAN

388,1

JUTA USD

Top 3 Komoditas Ekspor Indonesia

Kelapa Sawit



256,1
JUTA USD

Pinang



24,8
JUTA USD

Kelapa



18,6
JUTA USD

Top 3 Komoditas Impor Indonesia

Kurma



14,3
JUTA USD

Kacang Tanah



1,7
JUTA USD

Kulit



1,1
JUTA USD



Mentan RI Syahrul Yasin Limpo dengan Menteri Pertanian, Pangan, dan Perdesaan Republik Korea, Yang Mulia (Y.M) Chung Hwang-Keun di Kantor Pusat Kementerian Pertanian menandatangani MoU bidang pertanian antar kedua negara (16/5/23)

PERPANJANG MOU, INDONESIA DAN KOREA SELATAN SEPAKAT PERKUAT SEKTOR PERTANIAN KEDUA NEGARA

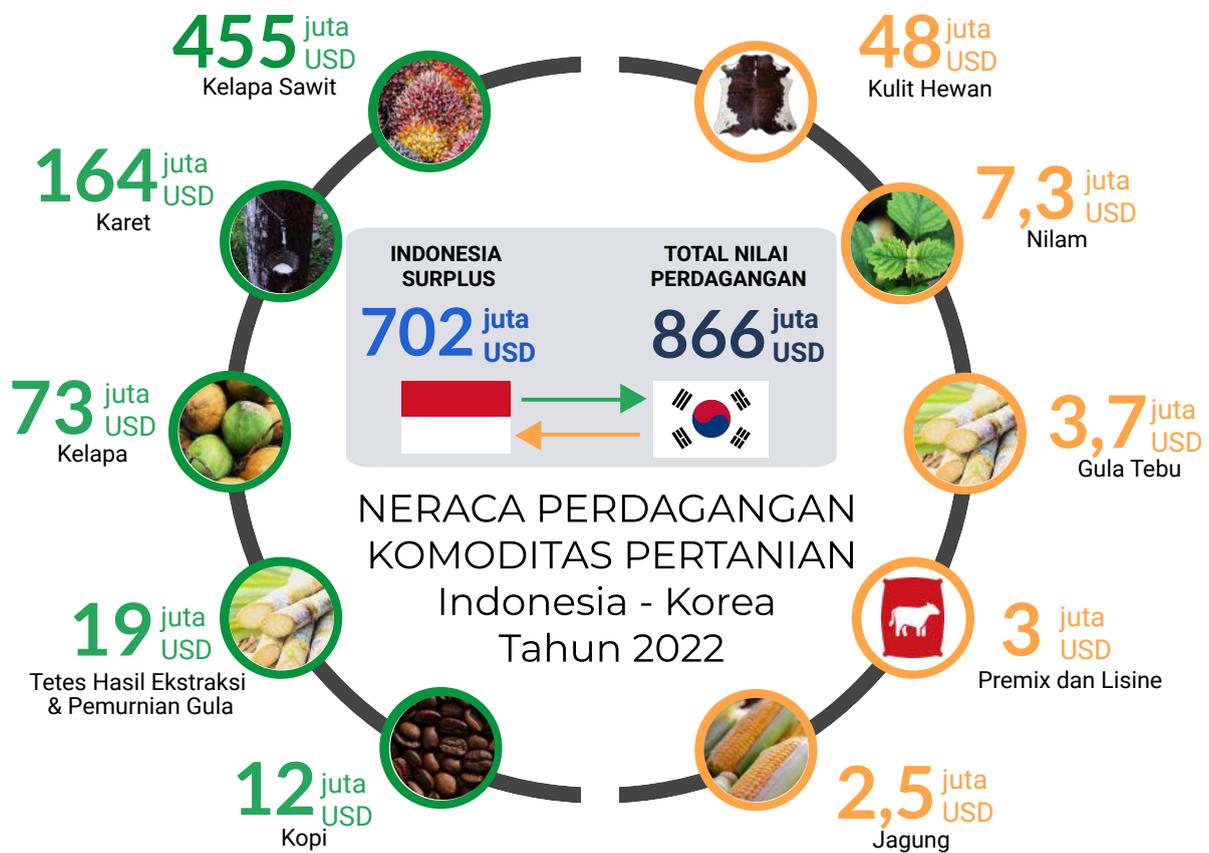
Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menerima kunjungan Menteri Pertanian, Pangan, dan Perdesaan Republik Korea, Yang Mulia (Y.M) Chung Hwang-Keun di kantor Kementerian Pertanian pada 16 Mei 2023. Kedua Menteri berdiskusi tentang penguatan kerja sama pertanian Indonesia – Korea Selatan, utamanya kolaborasi dalam penerapan pertanian pintar (*smart farming*) guna mendukung percepatan realisasi visi misi Kementerian Pertanian yang menjadikan pertanian Maju, Mandiri, dan Modern.

Di samping itu, pertemuan juga menyepakati rencana pemberian hibah pemerintah Republik Korea guna pengembangan *vocational school* (sekolah pertanian) Kementan. Fokus hibah ditujukan pada peningkatan kapasitas fisik sekolah pertanian, pengajar dan para mahasiswa yang diharapkan nantinya akan bertaraf internasional.

Pada kesempatan tersebut, Mentan RI mengundang pihak pelaku usaha Korea Selatan untuk berinvestasi pada pengembangan industri susu di Indonesia.

Sebagai bentuk skema kerja sama *trade-off* Indonesia-Korea Selatan, Y.M. Chung Hwang-keun menyampaikan keinginannya agar produk pertanian segar asal Korea Selatan dapat masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, serta menjalin kerja sama HALAL untuk produk pertanian segar.

Sebagai penutup pertemuan, kedua Menteri Pertanian menandatangani pembaruan *Memorandum of Understanding* (MoU) bidang pertanian antar kedua negara, yang difokuskan pada pengembangan pertanian pintar (*smart farming*), kolaborasi pengembangan mesin dan alat pertanian, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan investasi sektor pertanian di Indonesia.



COURTESY CALL DUTA BESAR KOREA SELATAN UNTUK INDONESIA DENGAN MENTERI PERTANIAN RI

Pada 12 April 2023, Mentan Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia yang baru, Y.M Lee Sang Deok dan diskusi kerja sama pertanian serta rencana kunjungan kerja Menteri Pertanian, Pangan, dan Perdesaan Republik Korea pada bulan Mei 2023.

Dalam pertemuan, Mentan RI menyampaikan neraca perdagangan sektor pertanian kedua negara tahun 2022 mencapai USD 866 juta, dengan nilai ekspor produk pertanian Indonesia ke Korea sebesar USD 784 juta.

Produk perkebunan Indonesia seperti kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao menjadi komoditas terbanyak diekspor ke Korea Selatan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki produk perkebunan unggulan lain yang dapat diekspor ke Korea Selatan seperti stevia, vanili, dan minyak atsiri.

Saat ini Indonesia sedang berusaha memasukkan buah mangga dan bunga *polyscias* ke pasar Korea Selatan yang masih terkendala kebijakan pihak Korea yang menerapkan mekanisme penggunaan *Hot Water Treatment* (HWT) untuk mitigasi lalat (larva) dari buah mangga.



Courtesy Call Mentan RI Syahrul Yasin Limpo dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Y.M. Lee Sang Deok di Kementan (12/4/23)



Courtesy Call Mentan RI Syahrul Yasin Limpo dengan Duta Besar Austria untuk Indonesia, Y.M. Dr Thomas Loidl di Kementan (13/4/23)

COURTESY CALL DUTA BESAR AUSTRIA UNTUK INDONESIA DENGAN MENTERI PERTANIAN RI

Pada 13 April 2023, Duta Besar Austria untuk Indonesia, H.E. Dr. Thomas Loidl, melaksanakan *Courtesy Call* kepada Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ajang perkenalan Duta Besar Austria untuk Indonesia yang baru menjabat pada September 2022 kepada Mentan RI.

Dari sisi perdagangan, Indonesia mengalami defisit perdagangan sektor pertanian dengan Austria sebesar USD 6,6 juta pada tahun 2022, dengan ekspor utama komoditas pertanian Indonesia ke Austria, yaitu buah nanas, nilam, dan kelapa. Sementara komoditas impor utama asal Austria diantaranya pakan hewan, premix dan lisin, dan apel.

Kedua pihak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong kerja sama fasilitasi akses pasar dan investasi pertanian antara Indonesia dan Austria. Pemerintah RI juga berkeinginan untuk menjajaki peluang kerja sama terkait program pendidikan dan pelatihan vokasi (magang) untuk SDM pertanian dan petani milenial di bawah binaan BPPSDMP Kementan.



THE 1ST INDONESIA- AUSTRALIA WORKING GROUP ON AGRICULTURAL COOPERATION

Pertemuan the 1st Indonesia-Australia *Working Group on Agricultural Cooperation* (WGAC) dilaksanakan pada 29 November 2022 untuk menyepakati konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK) WGAC serta membahas rencana dan program kerja sama pertanian antara Indonesia dan Australia. Pertemuan didahului oleh pertemuan gugus tugas (*Task Force*) pada 28 November 2022 yang menyepakati Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan program kerja sama RI-Australia yang selanjutnya akan dilaporkan pada pertemuan *working group* pada 29 November 2022. Delegasi Australia dipimpin oleh Mr. Chris Tanning, *First Assistant Secretary, Agriculture Trade and Market Access Division, DAWE*.

WGAC menyetujui 4 (empat) Kerangka Acuan Kerja (KAK) gugus tugas/*Task Force* (TF), yaitu:



**Crops and Plant
Products TF**



**Livestock and Animal
Products TF**



**Modern Systems
and Processes TF**



**Agriculture Research
and Education TF**

Selain itu, WGAC juga membahas perkembangan terkait:

- *Industry Advisory Forum* (IAF): Perlu pertimbangan lebih lanjut untuk mengidentifikasi hal-hal sensitif yang menjadi tanggung jawab pihak swasta dan pemerintah. Pihak Indonesia setuju untuk *endorsement* dan *establishment* IAF.
- Implementasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA): Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait aspek teknis. Isu-isu spesifik terkait IA-CEPA akan diselesaikan melalui pertemuan kedua negara di bawah mandat Kementerian Pertanian.
- *Red Meat and Cattle Partnership* (RMCP): Indonesia mengusulkan agar manajemen di bawah RMCP dapat membuat rekomendasi dari praktik terbaik untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Pertemuan berikutnya diharapkan dapat memasukan agenda terkait kemitraan RMCP.

Pertemuan WGAC ke-2 direncanakan akan dilaksanakan pada akhir 2023 di Australia.

PERTEMUAN DUTA BESAR RI UNTUK NAMIBIA DENGAN SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN



Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Dubes RI untuk Namibia, Wisnu Edi Pratiknyo (25/11/22)

Pertemuan Duta Besar RI untuk Namibia, Wisnu Edi Pratiknyo, dengan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono, membahas sejumlah hal terkait kerja sama pertanian RI-Namibia.

Dalam pertemuan, Sekjen Kementan menyampaikan agar *capacity building* dicantumkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama RI-Namibia sebagai payung Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), termasuk untuk pengiriman *experts* sebagai dukungan *pilot project*. Indonesia juga siap bekerja sama dalam hal transfer teknologi, misalnya inovasi varietas padi unggulan padi GOGO yang dikembangkan Indonesia dan cocok di lahan kering dapat diaplikasikan di lahan pertanian Namibia.

Dubes Pratiknyo menyampaikan peluang kerja sama yang dapat dijajaki antara kedua negara, antara lain menindaklanjuti *the 2nd Joint Working Committee on Agriculture* (JWCA) yang tertunda sejak 2018, penawaran pelatihan di bidang pertanian, serta menjajaki peluang investasi dan kerja sama teknik di bidang pertanian.

Selanjutnya, Sekjen Kementan juga menyampaikan informasi terkait Program ODICOFF, yaitu Kegiatan *One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture*, yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pasar produk pertanian Indonesia, khususnya *specialty coffee*, buah tropis eksotik, dan bunga. ODICOFF diharapkan dapat menjadi *platform* untuk menarik para investor, dan Dubes RI untuk Namibia juga dapat memfasilitasi kegiatan tersebut di Windhoek, ibukota Namibia.



FIVE QUICK FACTS

- Multilingual Country
- The driest country in Sub-Saharan Africa and depends largely on groundwater
- 70% of the country's population depends on agriculture (mostly subsistence sector)
- Major crops include maize, millet and sorghum
- Import partners South Africa, the Netherlands, Germany, the Russian Federation and Morocco

PERTEMUAN SEKJEN KEMANTAN DENGAN TIM GROW ASIA DAN PISAGRO

Pertemuan dilaksanakan pada 30 November 2022 dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyo, dan *Executive Director Grow Asia* yang baru, Beverley Postma, yang memperkenalkan diri dan menyampaikan informasi kinerja *Grow Asia* dan menjajaki peluang peningkatan kerja sama ke depan, khususnya dalam kapasitas Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 mendatang.

Grow Asia merupakan salah satu *platform multi-stakeholder* yang didirikan oleh *World Economic Forum (WEF)* untuk ASEAN dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama *Regional Public-Private Partnership (PPP)* dalam mendukung pengembangan sistem pangan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di ASEAN. Saat ini *Grow Asia* memiliki empat program unggulan, yakni: *Agri-Food Innovation, Women's Economic Empowerment, Responsible Agricultural Investing* dan *Climate Change Adaptation and Resilience*.

Terkait dengan kerja sama pelatihan, *Grow Asia* telah berhasil melakukan beberapa pelatihan di Afrika khususnya dalam bidang *capacity building* untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Grow Asia* berencana untuk melakukan kerja sama pelatihan *women empowerment* dalam bidang kakao di Sulawesi pada tahun 2023 yang akan diikuti 4000 peserta wanita. Diharapkan pada kesempatan kali ini, *Grow Asia* dapat melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan menjadikan kerja sama ini sebagai *pilot project* di wilayah regional.

Dalam pertemuan, Sekjen Kementan menyambut baik inisiatif *Grow Asia* dan menyampaikan fokus strategi Kementan saat ini untuk meningkatkan produk pangan, mengganti bahan pangan pokok dengan bahan pangan pengganti (sagu, singkong, beras shirataki dan sorghum), mencari alternatif impor komoditas gandum, dan mengubah ketergantungan masyarakat terhadap daging sapi dan menggantinya dengan daging ayam, bebek atau kambing.

Grow Asia mengharapkan kerja sama ini dapat dilanjutkan dengan sebuah perjanjian kerja sama yang konkret seperti *Memorandum of Understanding (MoU)* yang dapat ditandatangani kedua pihak.



Sekjen Kementan Kasdi Subagyo bersama Executive Director Grow Asia, Beverley Postma, dan tim PISAGRO (30/11/22)



Grow Asia is a multi-stakeholder platform established in 2015 jointly by



to bring all stakeholders in the region to convene, facilitate, and scale efforts that promote more inclusive, resilient and sustainable food systems in Southeast Asia



Secretariat in Singapore

6

Country Chapters: Cambodia, INDONESIA (PISAGRO), Myanmar, the Philippines, Vietnam, PNG

44

Working Groups, organized around specific value chains (such as coffee) or cross-cutting issues (such as agri-finance)

THREE GOALS

Creating more inclusive value chains

Supporting adoption of more climate-smart solutions

Increasing food safety and security in the region

Source: growasia.org

SIDANG PUTARAN KE-2 PILAR I PERDAGANGAN, KLASTER PERTANIAN INDO-PACIFIC ECONOMIC FRAMEWORK (IPEF) FOR PROSPERITY



Pertemuan putaran ke-2 *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity*, Pilar I Perdagangan telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tanggal 13-19 Maret 2023. Untuk Klaster Pertanian, pertemuan dipimpin oleh Julie Callahan, *Assistant U.S Trade Representative (USTR) for Agricultural Affairs and Commodity Policy*, sementara itu Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian dengan unsur Delri dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri.

Sidang dihadiri oleh perwakilan 13 Negara anggota IPEF, terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Fiji, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand dan Vietnam dan US minus India yang tidak tergabung dalam pilar I. Dalam pertemuan ini terdapat beberapa isu yang menjadi pembahasan utama yaitu; (1) pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*); (2) *sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *Non-Tariff Measures (NTMs)*; dan (3) isu mengenai *Agricultural Biotechnology*.

Dalam pembahasan isu *sustainable agriculture*, disampaikan bahwa Indonesia memiliki pandangan yang sama dengan beberapa negara anggota IPEF yaitu, Filipina, New Zealand, Japan, Korea dan Malaysia yang memandang *sustainability* memiliki cakupan konsep yang luas meliputi konsep Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Perlunya dipertimbangkan kondisi masing-masing negara yang berbeda, dan juga aspek dari *sustainability* itu sendiri. Perlu dipertimbangkan dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan saja tetapi juga bagaimana kontribusinya terhadap perekonomian, khususnya terhadap kesejahteraan petani. Lebih lanjut Indonesia menyarankan untuk lebih menyederhanakan definisi yang dapat dipahami serta membatasi cakupan namun tetap memberikan gambaran secara umum mengenai *sustainability*. Selain itu, pembahasan ini juga harus sejalan dan tidak duplikatif dengan pembahasan isu yang sama di pilar III (*Clean Economy*) mengenai isu *sustainability*.

Selanjutnya, masih dalam bahasan isu yang sama, Australia, New Zealand, Indonesia dan Malaysia sepakat mendorong untuk tidak membahas isu pertanian berkelanjutan menjadi standar perdagangan baru (*protectionism*). Hal ini mempertimbangkan isu *Sustainable Agriculture* di WTO yang banyak diusung oleh Negara maju yang diindikasikan memanfaatkan isu ini sebagai upaya *non-tariff measure*. Beberapa negara, antara lain Korea, New Zealand, Australia, Malaysia, Jepang, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menekankan prinsip kehati-hatian dengan pengembangan dan perdagangan bioteknologi dalam mengatasi permasalahan keberlanjutan. Kemudian, terkait dengan rencana pengembangan teknologi untuk pertanian berkelanjutan disepakati bahwa tidak hanya akan ditujukan dengan penerapan salah satu teknologi (*biotechnology*), namun mempertimbangkan kondisi dinegara masing-masing peserta IPEF (*no one size fit for all/unique circumstances*).

Pada sesi pembahasan isu *sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Non-Tariff Measures* (NTMs), Proponen Negara Maju seperti NZ, Australia dan Amerika mendorong keterbukaan yang lebih terhadap penerapan SPS. Indonesia dalam posisi untuk lebih mendorong agar penerapan SPS mengacu pada *Agreement SPS* yang sudah ada (WTO). Selain hal tersebut, Australia didukung New Zealand mengajukan artikel terkait dengan penerapan NTMs, yang diharapkan negara anggota IPEF dapat mencegah hambatan perdagangan yang tidak diperlukan (*unnecessary measure*). New Zealand juga menambahkan *standard/guideline* yang ada di *Technical Barriers to Trade* (TBT) WTO, yang lebih luas dari konsep SPS. Karena selama ini banyak hambatan importasi tidak hanya faktor SPS namun juga hambatan teknis yang di luar SPS. Namun demikian, Amerika dan beberapa negara partisipan IPEF keberatan untuk menyertakan pembahasan TBT pada *draft text* ini.

Dalam isu terakhir yang dibahas, yaitu *Agricultural Biotechnology*, secara umum selain AS, seperti halnya Indonesia, seluruh negara anggota IPEF menyatakan keberatannya untuk melakukan pembahasan fasilitasi perdagangan produk bioteknologi, dan mengusulkan agar pembahasan bioteknologi dapat lebih ditekankan kepada kerjasama teknis guna penguatan, pengembangan dan manajemen bioteknologi. Indonesia juga menyampaikan pertimbangannya terkait modern bioteknologi dan beberapa mengusulkan agar hal ini tidak dibahas dalam kerangka perdagangan, hal ini didukung oleh Korea, Jepang, Filipina dan Thailand dimana bioteknologi masih menjadi isu sensitif dalam negeri terkait keberterimaan produk bioteknologi.



CURRENT MEMBERS (14)



Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, Indonesia menyampaikan harapan agar seluruh pihak dapat menunjukkan fleksibilitas dalam ruang lingkup kerja sama dan mempertimbangkan tingkat perkembangan yang berbeda diantara negara anggota IPEF. Selain itu, perlu juga diperhatikan sinkronisasi isu dan meminimalisir duplikasi dengan pilar lain, seperti isu keberlanjutan di kluster pertanian yang juga dibahas pada Pilar III (Ekonomi Bersih). Terkait dengan isu keberlanjutan, disampaikan bahwa hal ini merupakan isu yang holistik, yang mencakup tidak hanya masalah lingkungan tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi, sehingga perlu adanya keseimbangan antara ketiga dimensi ini termasuk upaya dan perannya dalam kesejahteraan petani dan masyarakat setempat. Dengan demikian kesepakatan ini sedianya harus mencerminkan pemahaman ketiga konsep tersebut dan tidak disalahartikan sebagai upaya hambatan perdagangan antar negara anggota IPEF.

Forum ini diharapkan juga dapat menekankan kepada upaya untuk memperkecil kesenjangan dan menyamakan kedudukan diantara negara anggota IPEF yang memiliki tingkat perkembangan yang berbeda, seperti melalui pemberian perlakuan khusus ataupun bantuan teknis.



IMT-GT Strategic Planning Meeting (SPM) untuk Working Group Agriculture and Agro-based Industry (WGAA) ke-16

IMT-GT STRATEGIC PLANNING MEETING (SPM) UNTUK WORKING GROUP AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY (WGAA) KE-16

Memasuki tahun 2023, kerja sama IMT-GT dimulai dengan pertemuan *Strategic Planning Meeting* (SPM) untuk *Working Group Agriculture and Agro-Based Industry* (WGAA) pada 18 Januari 2023. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Mohd Faizal Harun, *Undersecretary International Division*, Kementerian Pertanian Malaysia. Sedangkan Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Biro KLN mewakili Kementerian Pertanian selaku *focal point* Indonesia pada kerja sama bidang pertanian ini. Pertemuan dibuka oleh *handover chairmanship* dari Indonesia kepada Malaysia. Pada sesi ini, ketiga negara berdiskusi terkait *concern* WGAA saat ini diantaranya:

- Perlunya penguatan komitmen kerja sama melalui identifikasi proyek-proyek yang akan membantu petani dalam mengadopsi teknologi inovasi dalam penerapan pertanian berkelanjutan.
- WGAA mengemban tugas besar untuk dapat memperkuat inisiatif melalui komoditas strategis yang berdampak luas bagi peningkatan ekonomi di kawasan seperti karet dan kelapa sawit.

- Strategi WGAA tahun ini adalah memperkuat kerja sama pada isu-isu krusial pertanian, termasuk memajukan daya saing komoditas subkawasan di pasar global, serta memperkuat ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan subkawasan tersebut.

Pada tahun 2023-2024, terdapat 3 proyek kolaborasi utama yang akan diselenggarakan di ketiga negara, yaitu:

1. *Regional Training for Agriculture Young Farmers* (akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan September 2024);
2. *Smart Farmer Technology Smart Choice of Young Farmer*, dan;
3. *Project on Economic Herb Production and Propagation Management Throughout Value Chain* (akan diselenggarakan secara berseri di ketiga negara dari tahun 2023-2024).

Selain itu, WGAA juga tengah mempersiapkan penguatan kerja sama kelapa sawit di kawasan melalui pembentukan *Project Implementation Team (PIT) IMT-GT Palm Oil Cooperation*.

Terkait dengan tindak lanjut kerja sama kelapa sawit, beberapa poin yang menjadi *concern* Indonesia antara lain: (1) pertemuan *1st Project Implementation Team (PIT) Meeting* diharapkan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan *Convergence Palm Oil Meeting* yang akan melibatkan lingkup lebih besar diantaranya yaitu anggota PIT, CIMT, *National Secretariat (NS)*, WGAA, *Working Group Trade and Investment (WGTI)*, *Working Group Environment (WGE)*, Jaringan Universitas IMT-GT dan JBC, serta; (2) perlu dilakukan finalisasi *Term of reference (ToR) Palm Oil* dan usulan area kerja sama kolaborasi serta *workplan* dari masing-masing negara.

MILESTONES KETERLIBATAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM PROGRAM SOUTH- SOUTH AND TRIANGULAR COOPERATION (SSTC)

1980

memberikan bantuan teknis untuk mendukung pembangunan pertanian di negara-negara berkembang di Afrika

1996

Mendirikan *Farmer's Agriculture and Rural Training Centre (FARTC)* di Mkindo, Morogoro, Tanzania, sebagai hub di Afrika Timur

1998

Mendirikan *Agricultural Rural Farmers Training Centre (ARFTC)* di Jenoi, Gambia, sebagai hub di Afrika Barat

2000

Secara aktif memberikan dukungan teknis melalui program bantuan alsintan, *dispatch expert* dan *capacity building* ke negara di kawasan Asia, Afrika, Pasifik

2013

MoU *Reverse Linkage Pemri* dan *IsDB* dengan pertanian sebagai salah satu sektor prioritas kerja sama

2015

Kementan mulai memasukan KSS ke dalam kebijakan pengelolaan program tematik mendukung RENSTRA dan implementasi *Reverse Linkage* dengan Kyrgyzstan

2021

MoU dengan FAO terkait Penguatan SSTC bidang pertanian dan ketahanan pangan

2022

Persiapan *Grant Agreement pembangunan Regional Training Center* di Rakiraki, Fiji sebagai hub di Pasifik dengan dukungan *Indonesian Aid*

Pemerintah Indonesia menempatkan SSTC atau Kerja Sama Selatan-Selatan (KSST) sebagai prioritas kerja sama pembangunan nasional.

Selama periode 2004 hingga 2022, KSST sektor pertanian telah memberikan manfaat bagi 1425 peserta dari 70 negara melalui 71 program pelatihan, 10.691 bantuan alsintan dan pengiriman tenaga ahli.

Bentuk bantuan teknis SSTC



Pelatihan



Seminar/field workshop



Magang



Pengiriman tenaga ahli



Bantuan alsintan



Pilot project

Pola pembiayaan: (i) ditanggung sepenuhnya oleh negara/lembaga mitra; (ii) ditanggung sepenuhnya oleh Pemri; (iii) *cost-sharing*; (iv) Triangular antara Pemri-mitra kerja sama-negara pemberi bantuan

KEMANTAN KEMBANGKAN PERTANIAN DATARAN TINGGI BERSAMA LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL



Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto, bersama Delegasi Lives and Livelihoods Fund di Kementan (27/3/23)

Direktur Jenderal Hortikultura, Dr. Prihasto Setyanto mewakili Kementerian Pertanian telah menerima kunjungan Delegasi Petinggi lembaga donor internasional *Lives and Livelihood Fund* (LLF) pada 27 Maret 2023, guna membahas agenda kerja sama dalam kerangka pengembangan sektor pertanian di beberapa daerah dataran tinggi terpilih di Indonesia.

Mendapatkan pendanaan senilai 70 juta USD dari *Islamic Development Bank* (IsDB) dan beberapa lembaga donor mitra LLF, Kementan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di dataran tinggi. Komitmen tersebut dijalankan melalui proyek UPLAND atau "*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project*" yang telah berlangsung sejak tahun 2020. Proyek UPLAND juga mendapatkan pendanaan bersama (*co-financed*) dari *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) dengan Pemerintah Indonesia, dan memiliki mandat untuk menjangkau 120.000 rumah tangga keluarga petani di 14 kabupaten di 7 provinsi dalam jangka waktu 5 tahun.

Resident Representative IsDB di Indonesia, Salah Jelassi menyampaikan, "Manfaat dari kegiatan ini bagi masyarakat petani dan pedesaan sudah sangat dirasakan dan perlu perpanjangan waktu untuk dapat merealisasikan seluruh rencana program di mana dapat dilihat progress di lapangan dan program sudah berjalan sesuai perencanaan." Kementerian Pertanian mengapresiasi dukungan mitra LLF untuk proyek UPLAND. "Kami berharap pertemuan ini dapat membuka peluang ekspor produk pertanian Indonesia ke berbagai negara, dan saya yakin UPLAND bisa mendukung program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks)" ungkap Prihasto Setyanto.

Rangkaian kunjungan LLF ke Indonesia merupakan yang pertama setelah pandemi Covid-19 dan dilakukan dalam rangka meninjau secara langsung proyek-proyek pembangunan di Indonesia yang disponsori oleh lembaga donor internasional mitra LLF. Pada kesempatan ini, delegasi LLF juga bertemu dengan perwakilan IFAD dan kementerian lain untuk memperkuat kerja sama yang telah terjalin, beberapa di antaranya yaitu Bappenas, Kemenkeu dan Kemenko Bidang Perekonomian.



Dalam rangkaian kunjungan ke Indonesia, para Delegasi Petinggi LLF juga berkunjung ke salah satu lokasi proyek UPLAND di dataran tinggi Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan proyek UPLAND yang mendukung pengembangan komoditas strategis masing-masing daerah, salah satunya beras organik di Magelang. Selama kunjungan yang berlangsung pada 28 Februari - 3 Maret 2023, para delegasi bertemu dan berbicara dengan para petani, termasuk petani perempuan dan millennial serta mendiskusikan peran mereka dalam kegiatan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dan diversifikasi pendapatan keluarga.

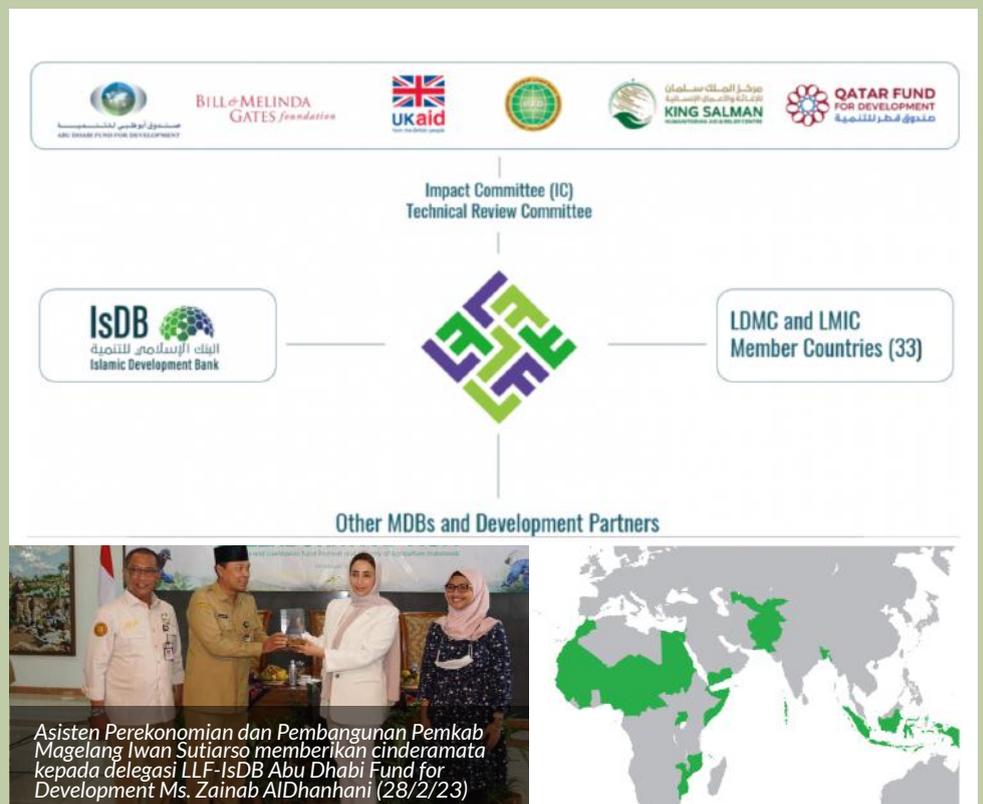
Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto bersama IsDB Resident Representative, Mr. Salah Jelassi sebagai perwakilan Lives and Livelihoods Fund saat Press Conference (18/3/23)

TENTANG THE LIVES AND LIVELIHOODS FUND (LLF)-ISDB

LLF merupakan inisiatif koalisi dana pembangunan terbesar di Timur Tengah yang didirikan sejak tahun 2016. LLF terdiri atas beberapa mitra lembaga donor internasional yaitu:

- Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)
- Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF)
- Islamic Development Bank (IsDB)
- Islami Solidarity Fund (IsFD)
- King Salman Humanitarian Aid and Relief (KSRelief)
- Qatar Foundation Fund for Development (QFFD)

LLF bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB. Hingga saat ini, upaya kolaboratif ini telah memberikan dampak perbaikan kehidupan ribuan orang melalui 37 proyek di bidang kesehatan (47%), pertanian (39%), dan infrastruktur dasar (14%) di 22 negara anggota IsDB, termasuk Indonesia.



Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Magelang Iwan Sutiarmo memberikan cinderamata kepada delegasi LLF-IsDB Abu Dhabi Fund for Development Ms. Zainab AlDhanhani (28/2/23)

KERJA SAMA

TIDAK MENCAIPI KONSENSUS, SIDANG DEWAN FAO SESI KE-171 DAN 172 DIWARNAI PENGAMBILAN SUARA MELALUI VOTING

Pertemuan Dewan FAO Sesi ke-172 dilaksanakan di Roma pada tanggal 24-28 April 2023 di Roma, Italia. Delri diwakili oleh unsur Kementerian Luar Negeri dan KBRI Roma yang hadir secara fisik, serta Kementan, Bappenas, dan KLHK yang menghadiri sidang secara daring.

Beberapa isu yang mengemuka dalam pertemuan antara lain isu mengenai wacana kenaikan anggaran FAO. Dewan FAO telah mengajukan kenaikan anggaran sebesar 3,9% - 5,6% dari anggaran tahun 2022/2023, namun proposal ini belum memperoleh konsensus dari negara-negara anggota terutama negara donor. Selama 12 tahun ini, FAO telah menerapkan *zero nominal growth* dalam penganggaran sehingga menggantungkan pendanaan dari kontribusi sukarela para anggota. Selain itu, terdapat tuntutan agar manajemen sumber daya FAO dapat lebih efisien dan berimbang serta desakan untuk penguatan peran FAO dalam implementasi rencana aksi AMR 2021-2025, manajemen sumber daya air, transformasi sistem pangan berkelanjutan, dan pemanfaatan inovasi teknologi. Tidak tercapainya konsensus dalam agenda 5, 5.1 dan 6 terkait dampak perang di Ukraina menyebabkan Independent Chairperson terpaksa mengambil voting dengan hasil lolosnya proposal *draft* keputusan dari kelompok negara Barat. Delri mempertahankan posisi netral dengan memilih "yes" tanpa menjadi co-sponsor proposal.

Sebelumnya, pada sesi ke-171 pertemuan Dewan FAO tanggal 5-9 Desember 2022, konflik Rusia-Ukraina masih menjadi topik utama pembahasan yang memicu perdebatan antar negara anggota. Dalam pertemuan tersebut, seperti terjadi pada beberapa pertemuan setingkat di FAO belakangan ini, keputusan pada salah satu agenda item terpaksa diadopsi melalui mekanisme voting karena tidak adanya konsensus. Hasil voting pada *Agenda Item 3: Update on FAO's work on the global food crisis* meloloskan *draft* keputusan FAO Council yang diajukan oleh kelompok negara Barat. Posisi Indonesia pada voting tersebut adalah "yes" dengan menekankan pentingnya perdamaian sehingga mendorong agar perang dihentikan segera, dan menyayangkan tidak dapat tercapainya konsensus di forum FAO.

Pertemuan Dewan FAO akan dilanjutkan dengan Konferensi FAO ke-43 (1-7 Juli 2023) dan FAO Council 173 (10 Juli 2023).



Negara anggota Dewan FAO pada sidang Council ke-172 (24/4/23)



Delegasi RI saat menyampaikan country statement Council-171 (5/12/22)



Delegasi RI saat menyampaikan country statement Council-171 (24/4/23)

DENGAN FAO



Kepala Biro KLN Kementan, Ade Candradijaya, bersama FAO Representative untuk Indonesia dan Timor Leste, Mr Rajendra Aryal, saat Launching Workshop CPF-FAO 2021-2025 di Bogor (1/12/22)

CPF FAO 2021-2025

Launching Workshop diselenggarakan sebagai tindak lanjut telah disepakatinya dokumen FAO *Country Programming Framework* (CPF) 2021-2025 oleh Pemerintah Indonesia dan FAO pada tahun 2022 dan kemudian mendiskusikan mengenai rencana tindak lanjut implementasi dan monitoring program CPF tersebut kepada seluruh *stakeholders* terkait.

CPF merupakan instrumen perencanaan dan pemrograman yang menerjemahkan Kerangka Kerja Strategis FAO menjadi aksi implementasi di Indonesia selama periode 2021-2025. Dokumen strategis ini disusun melalui kerja sama dan kemitraan yang erat dengan pemerintah Indonesia, dan bertujuan untuk mendukung prioritas, perencanaan, dan pelaporan pemerintah dalam upaya mendukung pencapaian Agenda 2030. Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi implementasi CPF di Indonesia dengan bekerja sama secara erat dengan kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

CPF *Strategic Priority* ditetapkan dengan mengacu kepada Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) 2021-2025 dan RPJMN 2020-2024, dengan empat prioritas yaitu:

- **CPF Priority 1:** *Well-resourced social protection schemes and essential evidence-based nutrition and food security programmes*
- **CPF Priority 2:** *Sustainable and inclusive production and consumption patterns and supply chains*
- **CPF Priority 3:** *Climate and disaster resilient agri-food chains*
- **CPF Priority 4:** *High-quality data for decision making within sustainable agri-food systems*

Mobilisasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan selama 5 tahun sebesar USD 68.95 juta.

PERKEMBANGAN

KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN ICCO DAN ICO

Indonesia sebagai salah satu negara produsen utama beberapa komoditas perkebunan terus berupaya mendorong akses pasar yang lebih baik dan melindungi ekspor komoditas pertanian Indonesia dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, seperti *the Association of Natural Rubber Producing Countries* (ANRPC), *International Coffee Organization* (ICO), *International Pepper Community* (IPC), *International Coconut Community* (ICC) dan *International Cocoa Organization* (ICCO). Dit. Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional Kemendag merupakan *focal point* keanggotaan Indonesia di ANRPC, ICO, IPC, serta ICC sementara Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian adalah *focal point* keanggotaan Indonesia di ICCO.

KERJA SAMA DENGAN ICCO

Sekretariat ICCO berlokasi di Abidjan, Côte d'Ivoire/Pantai Gading, dengan *Executive Director* yang dijabat oleh Michel Arrion (Belgia). Organisasi ini terdiri dari 51 negara anggota, dengan komposisi 22 negara pengekspor serta 29 negara pengimpor kakao. Negara anggota merepresentasikan 92% ekspor dan 80% impor kakao dunia. ICCO memiliki mandat untuk mendukung pembangunan sektor kakao secara berkelanjutan dengan mendorong kerja sama antara negara anggota dan antara para pemangku kepentingan kakao lainnya.

Indonesia mengajukan diri sebagai negara anggota ICCO pada 12 September 2011. Keanggotaan Indonesia disahkan melalui ratifikasi *International Cocoa Agreement*, 2010 dengan mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Cocoa Agreement*, 2010.

ICCO telah menyelenggarakan pertemuan *Reguler* Dewan ICCO ke-107 tanggal 25-28 April 2023 dan *Special Session* ke-37 tanggal 8 Desember 2022, secara *hybrid* di Abidjan. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Kemendag sebagai Delegasi Indonesia dan membahas agenda diantaranya (1) *Terms of Reference* Kelompok Kerja ICCO untuk Keamanan Pangan; (2) Pertemuan Panel *Ad Hoc*; (3) seleksi Direktur Eksekutif ICCO; (4) Pemilihan Ketua Dewan Kakao Tahun 2022/2023; dan (5) Perkembangan Studi ICCO: *Payment for Environmental Services* (PES).

Mengingat pentingnya isu keamanan pangan di sektor kakao utamanya terkait dengan kontaminan dan residu pestisida yang tertinggal di biji kakao dan produk kakao lainnya, pertemuan tersebut menyepakati untuk mendorong *Expert Working Group on Food Safety* (EWG-FS) untuk berfokus pada risiko keamanan pangan dan langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya serta mendukung produksi biji kakao berkualitas dengan meninjau regulasi dan manajemen risiko kakao.

Isu penting lainnya yang juga disepakati terkait *Ad Hoc Panel on Fine Cocoa*, *Council* akan mengadopsi usulan tentang biaya sebesar EUR 10.000 bagi negara *high-income* yang bukan anggota ICCO yang mengajukan diri dan menyampaikan berkas informasi teknis mengenai *Fine Flavour Cocoa* (FFC).

Saat ini pasar kakao dunia dibedakan menjadi dua kategori besar: *fine flavour* (di bawah 10% pasar) dan kakao curah atau biasa (di atas 90% pasar). Pasar kakao *fine flavour* adalah pasar yang sangat tersegmentasi, memiliki karakteristik penawaran dan permintaan tersendiri. Ekspor biji *fine flavour* di seluruh dunia 12% dari total ekspor dengan dominasi Amerika Latin (Ekuador, Dominika, Peru) sebagai eksportir utama yang menguasai 90% dari seluruh pasar kakao *fine flavour*. Dalam hal ini, Sekretariat ICCO akan mengadakan pertemuan Panel *Ad Hoc* setiap 4 tahun untuk meninjau volume ekspor kakao *fine flavour* dari negara-negara yang meminta.

Terkait posisi Indonesia, khususnya dalam agenda perkembangan studi ICCO: PES, pilot project rencananya akan dilaksanakan di tiga negara penghasil kakao, yaitu Kamerun, Indonesia, dan Peru. Selain itu, Indonesia akan mempresentasikan dokumen teknis terkait data FFC Indonesia pada pertemuan *Ad Hoc Panel on FFC* bulan Juni 2023.

- Agenda pertemuan ICCO berikutnya:
 - *Ad Hoc Panel on Fine Flavour Cocoa* tanggal 13-14 Juni 2023 di Antananarivo, Madagaskar.
 - *The 108th regular session of the Council and subsidiary bodies* tanggal 3-6 Oktober 2023.
 - *The commemoration of the 50 years of the ICCO* tanggal 2 Oktober 2023 di Abidjan.

FORUM KOMODITI

KERJA SAMA DENGAN ICO

ICO didirikan tahun 1963 dan memiliki sekretariat di London, Inggris, dengan 49 negara anggota yang terdiri dari 42 eksportir dan 7 importir, dan didirikan untuk mengatasi tantangan sektor kopi global dan mendorong pembangunan berkelanjutan pada pasar berbasis lingkungan (*market based environment*). Jumlah negara ini mewakili 93 persen produksi kopi dunia dan 63 persen konsumsi kopi dunia.

Indonesia bergabung sebagai anggota ICO berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2008 ttg Pengesahan *International Coffee Agreement* 2007.

Isu-isu yang berkembang pada perundingan di ICO saat ini terkait: (1) Pengesahan Resolusi Proses Penandatanganan *International Coffee Agreement* (ICA) 2022, sekaligus seremonial pembukaan penandatanganan ICA 2022; (2) penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan rantai pasok kopi melalui: komunikasi bersama serta implementasi MoU dengan organisasi dan lembaga internasional lainnya; (3) rencana implementasi regulasi deforestasi oleh Uni Eropa terhadap impor 6 komoditas, termasuk kopi; (4) pengembangan standar *living income* oleh *Coffee Public-Private Task Force* (CPPTF) ICO untuk peningkatan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor kopi; (5) dan proyek percontohan kemitraan pemerintah-swasta pada negara produsen terpilih guna menutup kesenjangan *living income*.

Pada 8 Maret 2023, Pemerintah Indonesia diwakili Kementerian Perdagangan selaku *national focal point* ICO telah menandatangani ICA 2022 di Kantor Pusat ICO di London.

ICA merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah yang mewakili negara-negara penghasil kopi dan konsumen kopi. ICA 2022 menjadi kesepakatan ketujuh sejak 1962, setelah ICA menetapkan kuota ekspor kopi untuk menstabilkan harga kopi dunia. ICA 2022 dibahas oleh anggota ICO sejak 2019 dan berhasil disahkan pada 9 Juni 2022.

Indonesia menjadi negara anggota ke-10 yang menandatangani ICA 2022 setelah Brasil, Kosta Rika, Nikaragua, Peru, Togo, Venezuela, Panama, dan Kolombia sebagai negara eksportir, dan Jepang sebagai negara importir kopi. Melalui penandatanganan ini diharapkan akan meningkatkan ekspor kopi nasional dan menjaga stabilitas harga kopi dunia sehingga dapat menguntungkan semua pemangku kepentingan rantai nilai sektor kopi, utamanya kesejahteraan petani kopi di Indonesia.

Menurut data ICO, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia, dan menjadi negara dengan konsumsi kopi terbesar kelima di dunia setelah Uni Eropa, AS, Brasil dan Jepang pada 2020/2021.



51 member countries: 22 export countries (INDONESIA), 29 import countries

92%

cocoa export



80%

cocoa import

represents the world's



93%

coffee production

63%

coffee consumption

49 member countries: 42 export countries (INDONESIA), 7 import countries



INTERNATIONAL
COFFEE
ORGANIZATION

PERKEMBANGAN PHLN

TREND KINERJA PINJAMAN LUAR NEGERI KEMENTAN DI TRIWULAN I 2023 MERANGKAK NAIK

Memasuki tahun anggaran 2023 Triwulan I, Biro Kerja Sama Luar Negeri melakukan rekonsiliasi data pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Kegiatan ini rutin dilakukan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari PHLN. Pertanggungjawaban pengelolaan PHLN, khususnya terkait dengan aspek keuangan, menjadi salah satu hal yang penting demi terwujudnya akuntabilitas keuangan Lingkup Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian yang dilakukan menjadi hal yang utama dalam pengelolaan kegiatan PHLN untuk menyajikan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dengan opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Kegiatan ini berpedoman pada amanat PP 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 224/2011 jo. PMK 180/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyajian laporan secara periodik menjadi alat yang efektif dalam mengendalikan dan memantau pertanggungjawaban aspek keuangan dan kinerja pinjaman maupun hibah luar negeri.

Pada tanggal 14 - 15 April 2023 telah dilaksanakan rekonsiliasi data dari total 7 pinjaman aktif dan satu *pipeline* proyek yang didanai oleh lima *Lender* (IFAD, ADB, IsDB, WB dan AIIB), dihadiri oleh para satker pengelola. Dari total AWP 2023 di masing-masing pengelola, kinerja dan penyerapannya sudah semakin baik. Meski status realisasi kumulatif masih belum dapat menunjukkan *progress variant* (pv) yang diharapkan, namun *trend* dari masing-masing proyek mengalami peningkatan. Proyek yang sebelumnya berstatus *At-Risk* menjadi Behind Schedule, terkecuali proyek ICARE yang baru direalisasikan di tahun 2023 masih mengalami hambatan karena baru mendapatkan legalitas SOTK (Struktural Organisasi dan Tata Kelola) dan sedang menunggu persetujuan anggaran (buka bintang) dari Kementerian Keuangan.

Dari ketujuh proyek aktif di Kementerian Pertanian dengan total pinjaman sebesar USD 447,5 Juta atau IDR 6,4 Triliun (asumsi nilai tukar kurs tengah BI 1 USD = IDR 14,500), sampai dengan triwulan 1 TA 2023 telah direalisasikan sebesar IDR 2,0 Triliun. Kinerja proyek masih mengalami banyak hambatan baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan. Untuk itu sangat diperlukan koordinasi antar pimpinan di tingkat pusat maupun daerah dalam pengalokasian pendaan dan memastikan kelancaran kegiatan.

Acronyms List!

| | |
|--------|---|
| IPDMIP | Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program |
| READSI | Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling-up Inntiative |
| SIMURP | Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project |
| YESS | Youth Entrepreneurship And Employment Support Services |
| ICARE | Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment |
| FMSRB | Flood Management in Selected River Basins |
| UPLAND | Development of Integrated Farming System in Upland Areas |
| HDDAP | Horticulture In Dryland Areas Project |
| IFAD | International Fund for Agricultural Development |
| ADB | Asian Development Bank |
| ISDB | Islamic Development Bank |
| WB | World Bank |
| AIIB | Asian Infrastructure Investment Bank |
| AWP | Annual Work Plan |

PROFIL REALISASI

Pinjaman Luar Negeri Kementerian Pertanian

TRIWULAN I 2023

29%

IPDMP 

Satuan kerja : BPPSDMP
Periode : 13/02/2017 – 30/09/2023
Total Komitmen : USD 98.500.000
Lokasi : 72 Kabupaten, 16 Provinsi
Donor : IFAD

49%

READSI 

Satuan kerja : BPPSDMP
Periode : 08/01/2018 – 31/03/2025
Total Komitmen : USD 39.855.000
Lokasi : 18 Kabupaten, 6 Provinsi
Donor : IFAD

37%

YESS 

Satuan kerja : BPPSDMP
Periode : 17/06/2019 – 31/12/2025
Total Komitmen : USD 55.300.000
Lokasi : 25 Kabupaten, 4 Provinsi
Donor : IFAD

66%

SIMURP 

Satuan kerja : BPPSDMP
Periode : 11/07/2018 – 30/06/2024
Total Komitmen : USD 16.519.867
Lokasi : 17 Kabupaten, 8 Provinsi
Donor : World Bank

84%

FMSRB 

Satuan kerja : Ditjen. PSP
Periode : 09/12/2016 – 31/03/2023
Total Komitmen : USD 2.442.156
Lokasi : 3 Kabupaten
Donor : ADB

29%

UPLAND 

Satuan kerja : Ditjen. PSP
Periode : 23/12/2019 – 30/06/2025
Total Komitmen : USD 120.000.000
Lokasi : 14 Kabupaten, 7 Provinsi
Donor : IFAD dan IsDB

0%

ICARE 

Satuan kerja : BSIP
Periode : 07/07/2022 – 30/06/2027
Total Komitmen : USD 100.000.000
Lokasi : 9 Provinsi
Donor : World Bank



At Risk

realisasi penarikan pinjaman mengalami keterlambatan yang akut sehingga beresiko memunculkan biaya tambahan yang harus ditanggung APBN



Behind Schedule

realisasi penarikan pinjaman lebih lambat dari jadwal yang direncanakan

PERKEMBANGAN

Dalam upaya mendukung transformasi sistem pangan global dengan mempromosikan lanskap yang berkelanjutan dan terintegrasi serta rantai nilai komoditas yang efisien, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan berpartisipasi dalam Proyek *Food Systems, Land Use, and Restoration* (FOLUR) yang didanai oleh *Global Environment Facility* (GEF).

Dalam proyek FOLUR yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, proyek ditujukan untuk menciptakan model keberlanjutan rantai nilai pada komoditas perkebunan yang ditargetkan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao melalui penerapan lanskap tata guna lahan yang komprehensif dengan memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, restorasi, dan degradasi lahan. Meskipun saat ini implementasi terbatas pada 5 provinsi dan 4 komoditas, proyek ini ke depan diharapkan dapat dijadikan *pilot project* untuk pengembangan lanskap terpadu berbasis komoditas pertanian yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Proyek FOLUR didanai dari hibah langsung GEF melalui UNDP dan FAO selama 72 bulan terhitung mulai dari tanggal 21 Februari 2022. *Project document* awal sudah ditandatangani sebagai salah satu syarat utama untuk proses registrasi pengajuan proyek hibah langsung ke Kementerian Keuangan. Sebagai *focal point* proyek di Kementan, Sesditjen Perkebunan menyampaikan misi dari proyek FOLUR bagi Kementan yaitu untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, dan mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani melalui pelaksanaan bimtek dan *capacity building* dalam hal implementasi GAP dan GHP komoditas.

Proyek ini juga diharapkan mendorong penguatan kelembagaan, pengembangan sistem perkebunan berkelanjutan berbasis spasial, yang nantinya dapat menghasilkan sertifikasi mutu dan keberlanjutan di tingkat petani.

DITJEN PERKEBUNAN DAN FAO TANDATANGANI IMPLEMENTATION ARRANGEMENT KERJA SAMA PROYEK FOLUR



Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementan bersama dengan FAO Representative untuk Indonesia dan Timor Leste saat penandatanganan kerja sama proyek FOLUR di Bogor (10/4/23)

KEGIATAN PHLN

Proyek kerja sama FAO dan Kementan terkait e-agriculture bertujuan memberikan bantuan teknis dalam mengembangkan dan menerapkan strategi e-agriculture (solusi digital untuk pertanian) melalui: (i) penyusunan strategi nasional; (ii) penguatan kapasitas; (iii) dukungan data dan informasi, khususnya dalam mendukung pengembangan *Agriculture War Room* (AWR) dan program prioritas Kementan, diantaranya GRATIEKS dan Peringatan Dini dan Tindakan Dini (*early action and early warning*). Kerja sama bernilai USD 230,000 ini dikelola sepenuhnya oleh FAO dan bekerja sama dengan Pusdatin sebagai *focal point* di Kementan. Durasi pelaksanaan proyek adalah 2 tahun sejak 7 April 2021.

Pada akhir bulan April 2023, telah dilakukan serah terima dokumen Strategi Nasional dan finalisasi untuk penyusunan *terminal report*. Selain menghasilkan dokumen *National Strategy e-Agriculture*, proyek juga berhasil mengembangkan aplikasi *Data Collection Platform* (DCP) yang dianggap sebagai salah satu solusi digital utama untuk menyusun basis data. DCP merupakan aplikasi berbasis *website* dan *mobile* yang dapat merekam data pertanian secara *real-time*. Aplikasi ini dikembangkan bersama UGM. Data yang telah dikumpulkan dan disusun dari lapangan terhubung data *real-time* AWR Kementerian Pertanian di Jakarta. Melalui informasi pertanian *real-time* diharapkan akan menghasilkan data terpercaya dan platform bagi para pembuat keputusan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Implementasi pemanfaatan DCP telah diujicobakan di dua lokasi yaitu: (i) Desa Cibuk Kidul, Kab. Sleman, Propinsi DIY; dan (ii) Desa Pupuan, Kab. Tabanan, Prov. Bali. Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah menambah lokasi pilot ke Kab. Subang, Jawa Barat untuk penerapan DCP.

Diharapkan proyek e-agriculture ini dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan potensi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Selain itu, solusi digital juga dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi petani, seperti perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, pengelolaan lahan pertanian yang kurang efektif, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman.

PROYEK TCP FAO STRENGTHENING DIGITAL AGRICULTURAL MONITORING CAPACITIES USING E-AGRICULTURE



Kepala Pusdatin Kementan bersama FAO Representative di lokasi pilot aplikasi DCP di Ds. Cibuk Kidul, Prov DIY (27/2/23)

Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) Kementerian Pertanian telah diimplementasikan sejak tahun 2018. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dana pinjaman dan hibah luar negeri sehingga data yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut dapat tersimpan dan mudah diproses untuk kebutuhan pelaporan dan pemantauan. Dari waktu ke waktu sistem ini telah disesuaikan mengikuti perkembangan situasi yang dinamis sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengawal kinerja proyek yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan terfasilitasinya pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) Kementerian Pertanian hingga tahap 4 di tahun 2022, Biro Kerja Sama Luar Negeri mengembangkan fitur tambahan, yaitu menu "Flash Report". Fitur ini ditambahkan sebagai sistem peringatan dini kepada para pemegang kebijakan mengenai perkembangan PHLN melalui layanan whatsapp gateway.

Diharapkan fitur ini dapat melengkapi kebutuhan pelayanan informasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri bagi pembuat kebijakan, unit perencana, unit teknis serta pengelola proyek PHLN yang menangani perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan-evaluasi kegiatan proyek PHLN baik yang dikelola oleh pusat maupun daerah sehingga hasil yang diperoleh maksimal dan tetap sesuai peraturan PHLN yang berlaku saat ini.

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan informasi PHLN yg semakin berkembang, meningkatnya kinerja pegawai ditunjang dengan aplikasi yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatnya kualitas SDM dengan penerapan teknologi terkini dalam aplikasi dan responsif dari pimpinan satker adalah sasaran dari menu tambahan ini, sehingga masing-masing kegiatan proyek dapat termonitor dengan baik.

Terkait kesiapan, menu *Flash Report* akan diuji coba pada triwulan II TA 2023, saat ini menu tersebut masih dalam tahap pengembangan.

INOVASI BARU PENINGKATAN KINERJA PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI SIPOR PHLN

SIPOR PHLN

<http://siporphln.pertanian.go.id/>

Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) Kementerian Pertanian merupakan aplikasi berbasis web untuk pemantauan dan pelaporan pelaksanaan dana pinjaman dan hibah luar negeri



PELUANG PENDANAAN GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF)

global environment facility
INVESTING IN OUR PLANET

GEF-8: HEALTHY PLANET, HEALTHY PEOPLE
Unified action towards 2030 Goals and Commitments

FOCAL AREAS

- Biodiversity
- Climate change mitigation
- Land degradation
- International waters
- Chemicals and waste

INTEGRATED PROGRAMS

- Food Systems
- Landscape Restoration
- Sustainable Cities
- Amazon, Congo, and Critical Forest Biomes
- Circular Solutions to Plastic Pollution
- Blue and Green Islands
- Clean and Healthy Ocean
- Greening Infrastructure Development
- Net-Zero, Nature-Positive Accelerator
- Wildlife Conservation for Development
- Elimination of Harmful Chemicals from Supply Chains

GLOBAL PROGRAMS

- Mobilizing the Financial Sector for Environmental Goals through Blended Finance
- Community Action for Global Transformation - Small Grants Program and Beyond

CROSS-CUTTING

Circular economy • Nature-based solutions • Gender responsiveness • Resilience • Private sector engagement

GEF-8 Resources

4-year replenishment cycle from July 1, 2022 to June 30, 2026

\$5.33 billion pledged by 39 donor nations

Country 'STAR' allocation levels released July 1, 2022

GEF-8 strategy responds to conventions and takes an **integrated approach to systems transformation**

GEF Replenishment Cycles (billion USD)

| Phase | Amount (billion USD) |
|-------------|----------------------|
| Pilot phase | 1 |
| GEF-1 | 2 |
| GEF-2 | 2.75 |
| GEF-3 | 3 |
| GEF-4 | 3.13 |
| GEF-5 | 4.34 |
| GEF-6 | 4.43 |
| GEF-7 | 4.1 |
| GEF-8 | 5.33 |

GEF Project Modalities

- Full-Sized Project (FSP):** over US\$2M
Approval by **Council** (twice a year & intersessional by mail)
- Medium-Sized Project (MSP):** US\$2M or less
Approval by **GEF CEO** (on a rolling basis)
- Program:** longer term and strategic arrangement of individual interlinked projects that aim at achieving large-scale impact
- Child Project:** an individual project under Program

Skema pendanaan lingkungan terbesar di dunia yaitu *Global Environment Facility* (GEF) saat ini memasuki siklus pembiayaan ke-8, dimana Indonesia menerima alokasi dana *System for Transparent Allocation Resources* (STAR) sebesar USD 103,65 juta untuk tiga *focal area strategies*: (i) keanekaragaman hayati, (ii) mitigasi perubahan iklim, dan (iii) degradasi lahan.

GEF merupakan mekanisme pendanaan yang dibentuk sebagai salah satu hasil *Rio Earth Summit 1992* (Konvensi Perubahan Iklim UNFCCC, *UN Convention on Biological Diversity* UNCBD), Konvensi Montreal, dan Konvensi Stockholm). Pendanaan GEF bersifat *incremental* atau pembiayaan tambahan dari pembiayaan dasar negara-negara penerima, sehingga diperlukan *co-financing* dari pemerintah dan pihak lainnya. Sumber pendanaan GEF berasal dari kontribusi berbagai negara yang diperbarui setiap 4 tahun (*replenishment cycle*). Di Indonesia, saat ini semua pengusulan proyek GEF dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim, KLHK selaku *Operational Focal Point* GEF di Indonesia.

GEF-8 menawarkan dua skema yaitu STAR Program yang merupakan *stand-alone project* dan *Integrated Program* (IP) yang melibatkan multipihak/*multistakeholders* untuk menangani isu-isu prioritas yang diharapkan dapat memberi dampak positif di tingkat nasional dan global. Kementerian Pertanian saat ini memiliki beberapa proyek yang memanfaatkan pembiayaan GEF yaitu:

Proyek GEF-7

- ✓ *Food System, Land Use and Restoration* (FOLUR), dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dengan *executing agency* di Kementan yaitu Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan; IA: FAO dan UNDP.
- ✓ *Crop Diversity for Sustainable Use in Indonesia* (CDCSUI/Crop Bio) dikoordinasikan oleh Kementan (cq. Biogen, BSIP). Saat ini dalam persiapan penandatanganan *Operational Partners Agreement* (OPA) oleh BSIP; IA: FAO.

Proyek GEF-8

- ✓ *Sustainable Livestock Production to Support Resilient Food Systems, Environment and Rural Livelihoods in Indonesia*, dikoordinasikan oleh Kementan (cq. PSI PKH, BSIP). Saat ini dalam tahap penyampaian revisi dokumen *Child Project Concept Note* oleh FAO-GEF Unit kepada GEF Secretariat.
- ✓ *Conservation and Sustainable Use of Horticulture Crop Diversity in Landscape for Community Resilience* (CSU-Horti), diusulkan oleh Kementan (cq. PSI Horti, BSIP) untuk mendapatkan alokasi STAR Project GEF-8 ke GEF OFF.

DISEMINASI KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN KERJA SAMA MULTILATERAL BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2022-2023



Foto bersama kegiatan Diseminasi yang dihadiri perwakilan K/L (20/1/23)

Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan menyelenggarakan kegiatan Diseminasi pada 19-21 Januari 2023 di Bandung yang dihadiri perwakilan Unit Eselon I lingkup Kementan dan mitra Kementerian/Lembaga terkait. Diseminasi bertujuan untuk menyampaikan *update* perkembangan kerja sama multilateral bidang pangan dan pertanian tahun 2022 dan agenda pertemuan multilateral tahun 2023. Diseminasi dibuka oleh Sekjen Kementan, Kasdi Subagyo yang menyampaikan arahan melalui *pre-recorded video*.

Diseminasi terdiri dari dua sesi paparan utama, yaitu (1) Internalisasi dan Tindak Lanjut Hasil G20 Presidensi Indonesia 2022 dalam Kebijakan dan Program Pembangunan Pangan Pertanian serta (2) Diseminasi Hasil Forum Kerja Sama dan Perkembangan Isu-Isu Strategis dalam Kerangka Multilateral Bidang Pangan dan Pertanian. Kesimpulan paparan dan hasil diskusi diantaranya:

- ✔ Implementasi kesepakatan G20 dan komitmen internasional lainnya perlu memerhatikan konteks geopolitik yang sedang berkembang. Untuk itu, koordinasi di antara *stakeholders* dalam negeri perlu diperkuat. Program-program dan kebijakan teknis perlu dikoordinasikan dan disinergikan, termasuk dari aspek politis.
- ✔ Untuk mengatasi hambatan-hambatan perdagangan internasional, perlu dibangun narasi terpadu yang berbasis data. Hal ini juga penting dalam konteks mendukung argumen Pemri pada saat melakukan diplomasi ekonomi.
- ✔ Mengingat DIPA tahun 2023 sudah disetujui, program/kegiatan Kementan di masing-masing Eselon I perlu dipetakan terlebih dahulu untuk dapat dikaitkan dengan komitmen-komitmen G20 dan dapat diperkuat di tahun berikutnya.



Kepala Biro KLN Kementan, Ade Candradijaya, pada sesi pembukaan Diseminasi di Bandung



Direktur PPKI Kemenlu, Antonius Yudi Triantoro, menyampaikan Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia dalam Forum Multilateral



PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan tenaga Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mengusulkan surat permohonan Surat Persetujuan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Biro Kerja Sama Luar Negeri membantu fasilitasi permohonan Surat Persetujuan bagi pejabat maupun pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.

Sepanjang tahun 2022, Biro KLN telah membantu fasilitasi 392 orang pegawai / pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri. Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri pada tahun 2022 dilakukan secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan karena masih diberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pandemi Covid-19.

Sementara selama periode Januari-April 2023, Biro KLN telah memproses permohonan Surat Persetujuan bagi 133 orang pegawai / pejabat. Diprediksi pada bulan-bulan kedepannya pada tahun 2023, Perjalanan Dinas Luar Negeri akan semakin bertambah tinggi intensitasnya dikarenakan tidak ada lagi pembatasan PDLN karena kebijakan PPKM pandemi Covid-19 sudah resmi dicabut oleh pemerintah.

KEGIATAN



PAMERAN SCE 2023: KOPI *SPECIALTY* INDONESIA DIMINATI DI AMERIKA SERIKAT

Kementerian Pertanian melalui Atase Pertanian di Washington DC, telah berpartisipasi dalam dalam Pameran *Specialty Coffee Expo (SCE)* 2023 tanggal 21-23 April 2023 bertempat di Oregon Convention and Exhibition Center, Portland. Pameran telah berhasil mencetak perkiraan transaksi sekitar USD 20,6 juta.

Pameran *Specialty Coffee Expo (SCE)* merupakan salah satu expo terbesar di dunia yang mempertemukan pemain kunci pelaku industri kopi dari berbagai kalangan, baik dari produsen, *grower*, *buyers*, manufaktur mesin & peralatan pengolahan kopi, penggilingan, *packaging* dan lain sebagainya. Pameran SCE 2023 tersebut dihadiri oleh lebih dari 14.000 pengunjung selama tiga hari pameran dan dimeriahkan oleh lebih dari 4.000 *exhibitor* dari berbagai negara.

Sebagai tindak lanjut, Atase Pertanian bersama dengan *Specialty Coffee Association Indonesia / SCAI* (Daryanto Witarsa), Java Halu Coffee, Coffee Flores dan Coffee Papua telah bertemu untuk menindaklanjuti keinginan dari *Volcanica Coffee* yang mengajukan pengiriman kopi dari Indonesia yang berasal dari beberapa lokasi antara lain: Sumatra Mandheling Gayo, Sulawesi Cebes Kalossi, Toraja Sulawesi White Eagle, Toraja Sulawesi – Kopi Bajawa Flores, West Papua dan Kopi Luwak Enzymatic dari Jawa Barat.

Selain itu, Atase Pertanian juga menindaklanjuti rencana kerja sama dengan Konsultan *Organic Insights* terkait desimnasi regulasi baru pada *organic coffee* serta tindak lanjut tawaran *capacity building* dengan Universitas Texas A&M.

PERKUAT DIPLOMASI PERWAKILAN RI DI AMERIKA SERIKAT, ATTANI WDC PAPARKAN RENCANA PROGRAM KERJA DI NEVADA

Rapat Kerja Perwakilan RI seluruh wilayah Amerika Serikat dengan tema “*Indonesia Incorporated*” telah dihadiri perwakilan KBRI Washington DC, PTRI New York, Konsulat Jenderal seluruh AS, Indonesia Investment Promotion Center, Perwakilan Bank Indonesia, BRI, BNI dan Telkom Indonesia, sukses diselenggarakan di Nevada 1-3 Maret 2023.

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Rosan P Roeslani menggarisbawahi pentingnya seluruh Perwakilan RI dan BUMN untuk bersinergi dan menajamkan diplomasi di AS seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dunia saat ini yang juga berdampak terhadap pembangunan sektor-sektor prioritas di Indonesia.

Pertemuan berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang, serta melakukan sinergi diplomasi dalam mendukung program kerja prioritas bersama untuk memajukan kepentingan Indonesia di Amerika Serikat.

Pada kesempatan tersebut, Atase Pertanian yang baru saja menjalankan tugasnya memanfaatkan kesempatan yang baik untuk memaparkan program-program kerja Attani WDC setahun ke depan, antara lain: rencana kolaborasi pameran *Specialty Coffee Expo*, penyelesaian *market access product pineapples*, pengawalan isu-isu kerja sama teknis dan *pending matters* lain.



ATTANI

PRODUK UNGGULAN PERTANIAN INDONESIA TAMPIL PADA PAMERAN FREE FROM FUNCTIONAL FOOD EXPO DI AMSTERDAM

Pameran *Free From Functional Food Expo* di Amsterdam merupakan kegiatan pameran tahunan untuk komoditas makanan minuman yang spesifik, yaitu tanpa gluten, tanpa susu, tanpa laktosa, tanpa telur, tanpa gula, tanpa daging, tanpa zat penyebab alergi, produk organik, maupun produk vegan yang saat ini sedang menjadi tren kuliner di Eropa.

Pameran yang diselenggarakan di gedung RAI Amsterdam pada tanggal 22-23 November 2022 ini diikuti oleh komunitas kuliner sehat dari berbagai negara di dunia. Selama 2 hari pameran, pengunjung yang datang merupakan pelaku usaha di bidang makanan dan minuman sehat, baik dari importir, distributor, dan retailer.

Pada pameran ini, Kementerian Pertanian dan Himpunan Alumni IPB (HA-IPB) bekerja sama menyewa *booth* seluas 68 m². Booth ini diisi oleh para pelaku usaha dari Indonesia dengan komoditas meliputi beras organik, kopi organik, teh, rempah-rempah, olahan buah manggis, bumbu olahan, *virgin coconut oil* (VCO), makanan olahan, dan madu.

Kegiatan dilanjutkan dengan *business matching* dengan para pelaku usaha, khususnya dari Belanda dan Belgia, pada tanggal 25 November 2022 dengan lokasi di RotterTram, Rotterdam, Belanda. Pada kegiatan *business matching* ini, telah ditandatangani 4 MoU antara korporasi pertanian (PT. Java Preanger Lestari Mandiri / JPLM) dengan: Interaromat BV untuk komoditas beras organik, Menthik Susu dan lada putih; Four Trade BV untuk komoditas kopi; Roemah Indonesia BV untuk komoditas kopi; dan Bina BV untuk komoditas bawang merah olahan dan produk organik lainnya.



INDONESIA JAJAKI KERJA SAMA DAN INVESTASI SAPI PERAH DENGAN BELANDA

KBRI Brussel bersama dengan KBRI Den Haag dan Kementerian Perindustrian melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian, Alam, dan Kualitas Makanan, Organisasi Pertanian dan Hortikultura di Belanda (LNV), Friesland Campina NV., dan beberapa petani sapi perah binaan Friesland Campina untuk mengetahui proses peternakan sapi perah secara modern dan berkelanjutan.

Delegasi Indonesia menyampaikan hal-hal berikut: (a) industri susu di Indonesia mengalami kekurangan bahan baku susu segar sebesar 80%; (b) keinginan beberapa perusahaan besar susu untuk membeli sapi perah dari Belanda, di antaranya PT. Great Giant Pinnacle, PT. Rafles, dan PT. Global Dairy, dengan total rencana pembelian sebanyak 8 ribu s.d. 16 ribu ekor sapi perah asli dari Belanda (Holstein); dan (c) menawarkan Indonesia sebagai "*a new hope for Dutch cattle*" dimana peternak sapi perah Belanda dapat merelokasi sapi perahnya ke Indonesia dan/atau melakukan investasi di Indonesia.

Menanggapi uraian Delri, pihak Belanda menyampaikan bahwa saat ini industri sapi perah di Belanda sedang berbenah untuk menghadapi perubahan iklim, khususnya terkait pengurangan tingkat nitrogen pada kotoran sapi, kesehatan tanah dan air untuk pakannya, danantisipasi tingginya curah hujan yang dapat memicu banjir. Terkait permintaan Delri, LNV pada dasarnya mendukung setiap perusahaan Belanda yang akan berbisnis di Indonesia, namun saat ini terdapat sensitivitas terkait perjalanan hewan ternak hidup jarak jauh yang terkait dengan *animal welfare*. Terkait hal ini, LNV usulkan alternatif berupa pengiriman materi genetik, seperti semen beku dan embrio beku yang akan lebih memungkinkan untuk dilakukan.



KEGIATAN



PENDAMPINGAN STUDY VISIT PENGUATAN KERJA SAMA SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) ANTARA UNI EROPA DAN INDONESIA DI ITALIA

Kementerian Pertanian menerima undangan dari Perwakilan Uni Eropa (UE) di Jakarta untuk mengikuti Study Visit Penguatan Kerja Sama Sanitary and Phytosanitary (SPS) antara Uni Eropa – Indonesia di 4 negara, yaitu Belgia, Denmark, Italia, dan Polandia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama melalui penguatan pemahaman bersama terkait aturan SPS dan sistem kontrol kesehatan hewan yang ada di Uni Eropa.

Selama kunjungan ke Italia, 30 Maret – 3 April 2023, Atase Pertanian Roma mendampingi Delegasi Kementerian Pertanian melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Italia di Roma, serta kunjungan ke Italia Alimentaria di Busseto, Parma; dan INALCA Spa di Modena. Dalam kunjungan ke Italia Alimentaria dan INALCA S.p.A., Delri melihat dan mempelajari penerapan regulasi UE terkait keamanan pangan dan ketertelusuran di tingkat unit usaha pemotongan dan pengolahan daging hingga produk siap dipasarkan. Sementara itu, dalam kunjungan ke Kementerian Kesehatan Italia, Delri mendapatkan penjelasan dan berdiskusi mengenai sistem kontrol dan pengawasan kesehatan hewan serta struktur perangkat kelembagaan dan alur komunikasinya dalam menjamin ketertelusuran (*traceability*) dan pemantauan situasi *epizootic* ternak sapi dan babi.

Terdapat peluang kerja sama peningkatan kapasitas terkait modul *traceability* dan LMS produk pangan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Kementan guna meningkatkan peluang Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk asal hewan dari Indonesia ke UE, khususnya Italia.

PARTISIPASI KBRI ROMA PADA PERINGATAN INTERNATIONAL TEA DAY 2023 DI KANTOR PUSAT FAO

KBRI Roma telah berpartisipasi dalam peringatan *International Tea Day 2023* yang diadakan oleh FAO pada tanggal 19 Mei 2023 bertempat di Kantor Pusat FAO. Kegiatan ini ditujukan untuk mempromosikan teh mancanegara dan memberikan edukasi mengenai peran penting UMKM teh bagi lingkungan, roda perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian SDGs.

Dalam kegiatan ini, KBRI Roma membuka stand/booth untuk mempromosikan teh asal Indonesia yaitu teh poci dan teh campuran cascara dari Netisane. Selain itu, KUIA KBRI Roma berpartisipasi dalam Seminar Internasional *Tea Day* dan memberikan *short intervention* mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam pengembangan teh di Indonesia.

Indonesia diharapkan dapat mengikuti kembali kegiatan serupa tahun depan mengingat pentingnya kegiatan ini untuk dapat dimanfaatkan sebagai *showcasing* produk teh asal Indonesia dan juga dampak positif produksi teh bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.



**International Tea Day at FAO Headquarters
"Bringing People Together Over a Cup of Tea"
19 May 2023**

Attani Roma

ATTANI

AUDIT UNIT USAHA DI JEPANG UNTUK MEMPERLUAS AKSES PASAR PRODUK PETERNAKAN INDONESIA - JEPANG

Dalam upaya meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Indonesia, khususnya untuk komoditas daging sapi, Jepang telah mengajukan registrasi unit usaha Rumah Potong Hewan kepada Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti hal ini, delegasi dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan melaksanakan serangkaian audit unit usaha daging di Jepang pada tanggal 21-25 Mei 2023 lalu. Delegasi dipimpin oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh. Syamsul Ma'arif, beserta dua orang Auditor drh. Eko Susanto dan drh. Imron Suandy. Audit ini merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas dan keamanan produk daging yang diekspor ke Indonesia, serta memperluas akses pasar bagi produsen daging Jepang.

Sebagai salah satu negara dengan standar keamanan pangan yang ketat, Indonesia mewajibkan adanya audit dan persetujuan dari Otoritas Veteriner di Indonesia sebelum produk daging impor dapat masuk ke pasar domestik. Dalam rangka memenuhi persyaratan ini, Jepang mengajukan persetujuan di berbagai unit usaha daging yang berpotensi menjadi mitra dagang utama dengan Indonesia. Sebanyak dua unit usaha yaitu Nishiawa dan Sanda Meat adalah rumah potong hewan yang dilakukan audit pada kegiatan ini.

Audit tersebut melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses produksi, kebersihan, manajemen kualitas, dan kepatuhan terhadap standar sanitasi pangan yang telah ditetapkan. Unit-unit usaha yang lulus audit akan mendapatkan sertifikasi yang memungkinkan mereka untuk mengekspor produk daging ke Indonesia.



KERJA SAMA PENINGKATAN KAPASITAS DAN PELUANG SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN ANTARA BPPSDMP DENGAN JA HOKKAIDO JEPANG

Pada tanggal 24 Mei 2023, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan dan JA Hokkaido secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama yang merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral di sektor pertanian dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Di sisi lain, JA Hokkaido juga menyambut baik karena hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sumberdaya di Hokkaido di bidang pertanian.

BPPSDMP dan JA Hokkaido menegaskan komitmen untuk bekerja sama dalam mengembangkan sektor pertanian melalui pertukaran pengetahuan dan pelatihan untuk para siswa dan mahasiswa Politeknik Pengembangan Pertanian, serta penyiapan peluang kerja untuk para alumninya. Berlokasi di kantor Pusat JA Hokkaido, Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Idha Widi Arsanti, dan Direktur dan Chairman JA Hokkaido, Mr. Toshiyuki Onodera, serta dihadiri perwakilan dari kedua belah pihak, termasuk dari KBRI Tokyo yang diwakili oleh Atase Pertanian Tokyo.

Perjanjian ini memiliki masa berlaku selama dua tahun, dimulai sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak dengan persetujuan bersama. Para pihak berharap bahwa melalui kerja sama ini, Indonesia dan Jepang akan saling mendukung dan menguntungkan dalam mengatasi tantangan global di bidang pertanian serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara sejalan dengan semangat 65 tahun persahabatan antara Indonesia dan Jepang.



KOLOM ANJAK

STRATEGI PERCEPATAN PEMANFAAATAN KEMITRAAN IA-CEPA

Dewi Kartika Damayanti dan Reynold Pandapotan Sitompul

Ringkasan Eksekutif

Indonesia – Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) merupakan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Australia yang menyasar perdagangan barang, jasa, dan investasi. Perjanjian ekonomi tersebut disepakati pada 4 Maret 2019 dengan prinsip dasar kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win*) secara berimbang.

Dengan diberlakukannya perjanjian IA-CEPA diharapkan dapat memberikan kemudahan akses pasar produk Indonesia di Australia melalui komitmen pembebasan tarif bea masuk sebesar 0% untuk seluruh pos tarif komoditi, fasilitasi perdagangan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses pasar jasa dan investasi di berbagai sektor termasuk sektor pertanian.

Faktanya, sektor pertanian belum menunjukkan peningkatan ekspor yang signifikan. Kurang optimal dalam pemanfaatan hasil perjanjian IA-CEPA mengakibatkan rendahnya volume perdagangan komoditas sektor pertanian ke Australia. Hal sebaliknya terjadi bahwa nilai ekspor komoditas pertanian Australia ke Indonesia menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan.

Tercatat nilai ekspor Australia untuk komoditas pertanian ke Indonesia terus melonjak dari tahun 2020, 2021, dan 2022 masing-masing sebesar USD 3,5 juta, USD 3,6 juta, dan USD 7,6 juta. Sementara nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Australia pada periode yang sama mengalami fluktuasi, dengan nilai masing-masing sebesar USD 275 ribu, USD 152 ribu, dan USD 284 ribu. Hal ini semakin memperlebar jurang neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia pada periode 2020-2022 masing-masing mencapai USD 3,2 juta, USD 3,4 juta, dan USD 7,3 juta.

Menyikapi fakta yang terjadi, diperlukan upaya-upaya strategis dan konkret guna membalikkan keadaan, atau setidaknya menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian kedua negara. Sehingga IA-CEPA bukan merupakan ancaman bagi Indonesia, akan tetapi suatu tantangan yang harus dimenangkan.

PENDAHULUAN

Pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai, program peningkatan ekspor menjadi salah satu prioritas utama bidang ekonomi dari Kabinet Indonesia Maju. Seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri menjadi ujung tombak untuk menerobos dan memperluas pasar global produk Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh Presiden RI, Kementerian Perdagangan melakukan inisiasi perundingan ekonomi dengan berbagai negara strategis guna meningkatkan nilai perdagangan. Australia menjadi salah satu negara mitra dagang dan ekonomi Indonesia yang cukup strategis. Perlambatan ekonomi dunia sejak satu dekade terakhir membuat Indonesia dan Australia berinisiatif untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang komprehensif.

BIRO KLN

KERJA SAMA EKONOMI

INDONESIA AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT



AREA PRIORITAS

Penguatan kapasitas teknis dan SDM untuk meningkatkan produktivitas di pertanian dan industri

Peningkatan daya saing melalui promosi dan inovasi

SPS - Penguatan karantina dan biosecurity

TBT - Harmonisasi standar dan kepatuhan produk

Peningkatan kapasitas UKM

Komunikasi dan koordinasi

Pertumbuhan sektor pariwisata

Peningkatan kapasitas pendidikan sistem vokasi (*Technical and Vocational Education and Training*)

Peningkatan standar dan daya saing tenaga kesehatan profesional

SEKTOR KHUSUS

Advance Manufacturing, Grains Partnership, Ternak, Hortikultura (Buah dan Sayuran Segar), tebu, Makanan dan Minuman

Produk Makanan, Obat-obatan dan herbal, industri kreatif, Pariwisata, Promosi Perdagangan dan Investasi, Horikultura

Ternak dan Hortikultura (Buah dan sayuran)

F&B, Produk Farmasi, Herbal dan Obat Tradisional, Tekstil, Alas Kaki, *Advanced Manufacturing and Component Industries*, Peralatan Medis, E-Commerce

F&B, Produk Farmasi, Herbal dan Obat-obatan Tradisional, Industri Kreatif (Ct. Handicraft, Fashion, dan Perhiasan)

Diseminasi / sosialisasi terkait fasilitasi perdagangan (eksportir dan importir)

Kapasitas SDM terkait promosi, Pengembangan tujuan pariwisata baru

Beasiswa, pelatihan bagi guru dan instruktur pendidikan vokasional untuk menciptakan pekerja yang memenuhi standar kualifikasi internasional

Pelatihan bagi tenaga kesehatan Indonesia untuk memenuhi standar kualifikasi internasional

Oleh karena itu, kedua negara sepakat untuk membentuk forum Indonesia – Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Dokumen perjanjian IA-CEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara pada 4 Maret 2019. IA-CEPA merupakan sebuah kemitraan ekonomi komprehensif yang menasar perdagangan barang, jasa, dan investasi.

Perjanjian ekonomi tersebut menganut prinsip dasar kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win*) secara berimbang. Kemitraan yang kedepannya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dalam jangka waktu yang panjang, dan untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan.

Manfaat diberlakukannya IA-CEPA bagi Indonesia yaitu meningkatkan daya saing dan akses pasar produk perindustrian, pertanian, perikanan, kehutanan, dan juga mendorong investasi Australia ke Indonesia. Sektor pertanian memiliki peranan penting dan signifikan dalam mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Australia. Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan utilisasi (pemanfaatan) perjanjian ekonomi IA-CEPA.

Pemanfaatan perjanjian ekonomi IA-CEPA diharapkan dapat sebagai perangsang dalam percepatan realisasi Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Pertanian (GRATIEKS) yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian. Skema-skema kerja sama ekonomi yang disepakati dalam IA-CEPA menjadi instrumen yang dapat mendorong tercapainya program GRATIEKS Kementerian Pertanian secara komprehensif.

Sumber: Direktorat Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan

KOLOM ANJAK

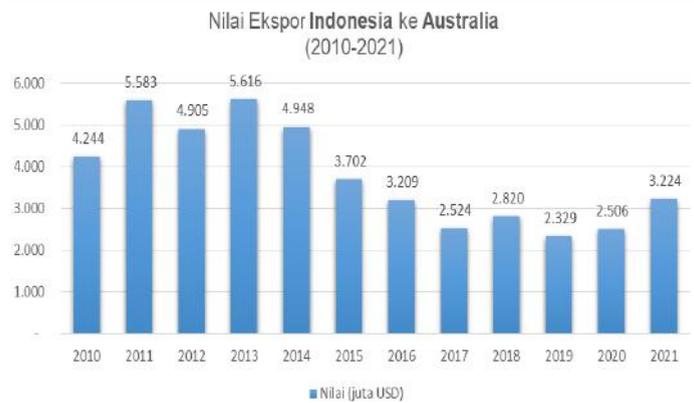
DESKRIPSI MASALAH

IA-CEPA memberikan kemudahan akses pasar produk Indonesia di Australia dengan komitmen pembebasan tarif bea masuk (preferensi) menjadi 0% untuk seluruh pos tarif komoditi, fasilitasi perdagangan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses pasar jasa dan investasi di berbagai sektor.² Sebagai bentuk resiprositas dalam skema IA-CEPA, Australia juga mendapatkan perlakuan yang sama yaitu pengenaan tarif 0% untuk produk Australia yang masuk ke Indonesia.

Memperhatikan kondisi neraca perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Australia sejak tahun 2014 telah mengalami defisit bagi Indonesia sebesar USD 1,7 juta. Sampai dengan tahun 2019 sebelum pemberlakuan IA-CEPA, Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan dengan Australia sebesar USD 669 ribu.

Tren peningkatan ekspor komoditas pertanian Australia semakin signifikan pasca pemberlakuan perjanjian ekonomi IA-CEPA. Tercatat nilai ekspor Australia untuk komoditas pertanian ke Indonesia terus melonjak dari tahun 2020, 2021, dan 2022 masing-masing sebesar USD 3,5 juta, USD 3,6 juta, dan USD 7,6 juta.

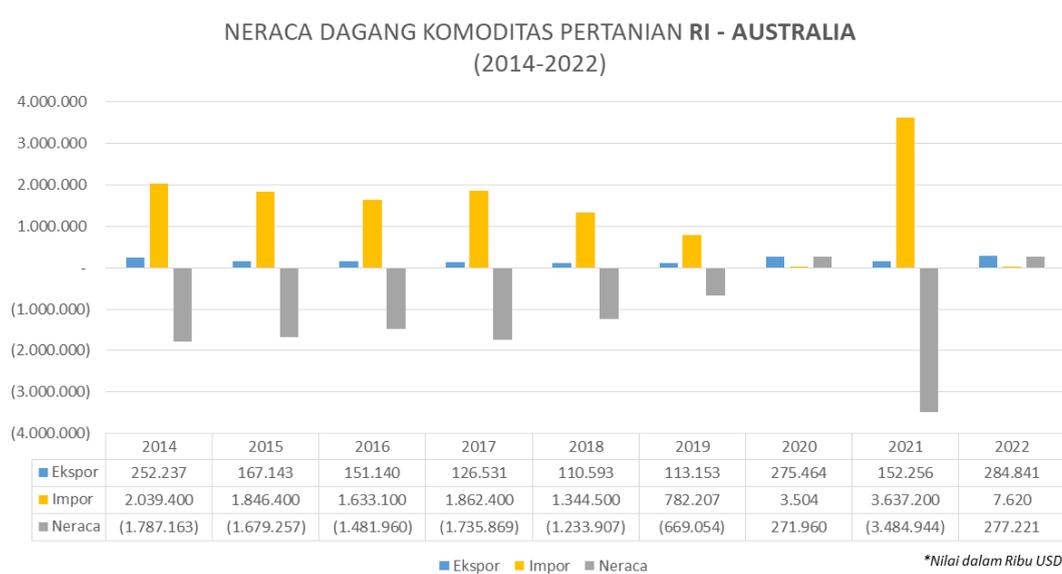
Tabel 1. Ekspor Pertanian Indonesia ke Australia (2010-2021)



Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementan RI, 2022

Sementara nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Australia pada periode yang sama mengalami fluktuasi, dengan nilai masing-masing sebesar USD 275 ribu, USD 152 ribu, dan USD 284 ribu. Hal ini semakin mempelebar jurang neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia pada periode 2020-2023, masing-masing sebesar USD 3,2 juta, USD 3,4 juta, dan USD 7,3 juta.

Grafik 1. Neraca Dagang Komoditas Pertanian RI-Australia (2014-2022) dalam ribu USD



Sumber: Pusat data dan Informasi Pertanian (2022)

Secara umum nilai ekspor sektor pertanian pasca diberlakukannya perjanjian IA-CEPA masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan hasil perjanjian IA-CEPA kurang optimal, sehingga mempengaruhi devisa negara khususnya pada sektor pertanian.

BIRO KLN

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil identifikasi masalah terhadap deskripsi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, terdapat 3 (tiga) potensi masalah yaitu 1) kurangnya sosialisasi perjanjian ekonomi IA-CEPA kepada pelaku usaha pertanian (eksportir), 2) kurangnya kemampuan pelaku usaha pertanian (eksportir) dalam memenuhi standar ekspor komoditas pertanian ke Australia, 3) masih rendahnya pemahaman para pelaku usaha pertanian (eksportir) dalam penggunaan form IA-CEPA.

Untuk memilih permasalahan utama dari tiga pilihan masalah tersebut, digunakan teknik *Urgency, Seriousness, Growth* (USG). Teknik USG merupakan alat untuk menyusun urutan prioritas masalah yang akan dicarikan penyelesaiannya. Dalam teknik USG, ranking teratas yang ditunjukkan dari skor tertinggi akan dipilih menjadi permasalahan utama (*core problem*).

Penilaian U-S-G untuk masing-masing masalah akan dinilai oleh beberapa orang yang memahami permasalahan IA-CEPA. Disamping itu, data dan informasi tentang nilai ekspor-impor komoditas pertanian, pertumbuhan ekonomi global dan nasional juga menjadi rujukan dan acuan dalam pembobotan USG.

Hasil pengumpulan data menggunakan U-S-G, sebagai berikut:

| No | Masalah Utama | Urgency | Seriousness | Growth | Score | Rank |
|----|---|---------|-------------|--------|-------|------|
| 1. | Kurangnya sosialisasi perjanjian ekonomi IA-CEPA kepada para pelaku usaha pertanian oleh Kementerian Pertanian | 5 | 4 | 5 | 14 | 2 |
| 2. | Kurangnya kemampuan eksportir dalam memenuhi standar komoditas pertanian yang ditetapkan mitra dagang Australia | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 3. | Rendahnya pemahaman para pelaku ekspor dalam penggunaan form IA-CEPA | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 |

Hasil USG menunjukkan skor tertinggi sebesar 15 berada pada masalah kurangnya kemampuan eksportir dalam memenuhi standar komoditas pertanian yang ditetapkan oleh mitra dagang Australia.

Untuk penyelesaian masalah terkait terbatasnya kemampuan eksportir dalam memenuhi standar komoditas pertanian, muncul pertanyaan yang harus dijawab yaitu:

"Bagaimana cara meningkatkan kemampuan eksportir sektor pertanian dalam memenuhi standar mitra dagang Australia tersebut?"

Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:

Alternatif 1: Melakukan program sosialisasi yang komprehensif mengenai strategi pemanfaatan perjanjian IA-CEPA bagi pelaku ekspor komoditas pertanian di seluruh Indonesia.

Alternatif 1 menjadi salah satu kegiatan yang direkomendasikan, hal ini mengacu pada kondisi yang ada bahwa masih banyak eksportir yang belum mengetahui tentang perjanjian IA-CEPA atau manfaatnya bagi para eksportir.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI sebagai *lead negotiator* Indonesia pada perundingan IA-CEPA menyampaikan bahwa tidak lebih 20% eksportir Indonesia yang menggunakan form IA-CEPA.

Hal ini sangat merugikan Indonesia, secara khusus bagi para pelaku ekspor bidang pertanian yang memanfaatkan form IA-CEPA kurang dari 4%. Disisi lain, para pelaku ekspor Australia sangat gencar memanfaatkan form IA-CEPA. Sehingga nilai ekspor Australia terus mengalami kenaikan paska pemberlakuan IA-CEPA.

Alternatif 2: Mengembangkan pelatihan yang fokus pada pemenuhan standar ekspor komoditas pertanian ke Australia.

Beberapa komoditas pertanian yang produksinya cukup tinggi di Indonesia, seperti produk hortikultura (salak, manggis, durian, buah naga, sayuran dan *floriculture*), produk peternakan (unggas dan produk turunannya, sarang burung walet, dan obat hewan), dan produk tanaman pangan (ubi, beras premium, dan porang) tercatat nilai ekspornya ke Australia masih -

KOLOM ANJAK

sangat kecil, atau bahkan ada yang belum dapat masuk ke pasar Australia. Sehingga perlu diberikan pelatihan kepada petani dan pelaku usaha pertanian yang fokus dalam memenuhi standar *Food Safety, Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Good Agricultural Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, dan *Traceability System*.

Alternatif 3: Menyediakan 'help desk' konsultasi penyiapan ekspor komoditas terutama dari sisi kualitas produk yang memenuhi syarat ekspor ke Australia di seluruh dinas pertanian.

Persyaratan *Food Safety, SPS, GAP, GHP dan Traceability System* merupakan persyaratan yang sudah umum ditetapkan oleh negara-negara maju untuk menjaga dan menjamin pangan (segar) yang dikonsumsi oleh para konsumen negara tersebut sudah aman.

Untuk itu, informasi-informasi persyaratan tersebut menjadi bagian tugas dari Badan Karantina Pertanian, Ditjen. Hortikultura, Ditjen. Tanaman Pangan, Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen. Perkebunan. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim (*Help Desk*) yang berisikan staf-staf kompeten dibidangnya untuk melayani seluruh kebutuhan petani dan pelaku ekspor komoditas pertanian.

Tim *Help Desk* tersebut juga berkolaborasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia untuk menampung dan mengakomodir seluruh permasalahan ditingkat petani dan pelaku usaha pertanian (ekspor).

Selanjutnya, seluruh informasi dilaporkan ke pimpinan secara berjenjang untuk dapat segera ditindaklanjuti dan dialokasikan anggaran dalam penyelesaian masalah atau kendala yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, selanjutnya ketiga alternatif rekomendasi kebijakan dianalisis menggunakan teknik *Grid Analysis*. Teknik *Grid Analysis* memiliki keunggulan teknik yaitu paling mudah digunakan untuk membuat keputusan ketika dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif.

| Kriteria | Alternatif 1: Melakukan Program Sosialisasi | Alternatif 2: Mengembangkan Pelatihan | Alternatif 3: Menyediakan help desk |
|--------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Efektifitas | 4 | 5 | 4 |
| Efisiensi | 5 | 3 | 3 |
| Aksesibilitas | 4 | 5 | 4 |
| Akseptabilitas | 3 | 5 | 5 |
| Kelayakan Teknis | 4 | 4 | 5 |
| Responsiveness | 4 | 5 | 4 |
| Nilai Total | 24 | 27 | 25 |

Keterangan: skor nilai menggunakan skala Likert: 1. Sangat kecil; 2. Kecil; 3. Sedang; 4. Besar; 5. Sangat besar.

Hasil analisis menunjukkan Alternatif 2: Mengembangkan pelatihan yang fokus pada pemenuhan standar ekspor komoditas pertanian ke Australia yang merupakan alternatif terbaik yang ditunjukkan dengan skor tertinggi yaitu 27.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah kurang optimalnya pemanfaatan perjanjian IA-CEPA adalah mengembangkan pelatihan yang fokus pada pemenuhan standar ekspor komoditas pertanian ke Australia.

LANGKAH KONKRET UNTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks; melibatkan banyak aktor dengan kepentingannya masing-masing (Erwan dan Dyah, 2012). Aktor yang akan terlibat dalam mengimplementasikan rekomendasi kebijakan yang kami rumuskan meliputi Sekretaris Jenderal, Para Pejabat Eselon I Teknis lingkup Kementan beserta jajarannya, Kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, petani, dan pelaku usaha sektor pertanian.

BIRO KLN

Rekomendasi kebijakan ini nantinya tidak hanya berhenti ketika kebijakannya telah diimplementasikan, akan tetapi perlu dilakukan evaluasi. Tujuan melakukan evaluasi adalah untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut (Muh Akbar dan Widya, 2018).

Berikut langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan:

1. Menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI untuk dilaporkan kepada Bapak Menteri Pertanian RI.
2. Menyusun SK Menteri Pertanian RI perihal Pembentukan *Task Force* Peningkatan Ekspor Pertanian dan Penyelesaian Kendala (Hambatan) Teknis Ekspor ke Australia. Tim *Task Force* terdiri dari Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian RI.
3. Tim *Task Force* yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal melakukan rapat koordinasi untuk menyusun rencana kerja *Task Force*.
4. Rencana kerja yang diharapkan dapat disusun sebagai berikut:
 - a. Identifikasi pelaku usaha pertanian potensial dan yang sudah ada untuk melakukan ekspor pertanian ke Australia.
 - b. Pembuatan basis data tentang kapasitas produksi, konsumsi domestik, pemetaan produksi berdasarkan wilayah, dan ekspor komoditas pertanian.
 - c. Identifikasi masing-masing hambatan yang dihadapi oleh petani/pelaku usaha pertanian dalam melakukan produksi, pemasaran domestik, dan ekspor ke Australia.
 - d. Identifikasi dan pengkajian regulasi dan persyaratan pemasukan produk pertanian dari negara asal ke Australia.
 - e. Menyusun agenda dan materi pelatihan tematik atau pendampingan teknis oleh Kementerian Pertanian/Tenaga Ahli/Akademisi.
 - f. Melaksanakan pelatihan tematik atau pendampingan teknis fokus pada pemenuhan kualitas produk pertanian untuk ekspor ke Australia secara reguler.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan.
5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi hasil pelatihan kepada Menteri Pertanian
6. Memonitor dampak pelatihan terhadap peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian.

REFERENSI

1. Dunn W. 2004. Public Policy Analysis: An Introduction. Pearson Prentice Hall
2. Kumorotomo W. Kriteria dan Teknik dalam Analisis Kebijakan. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.
3. Erwan A.P., Diah R.S. 2012. Implementasi Kebijakan Publik – Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta.
4. Muh. Akbar., Widya. 2018. Study Evaluasi Kebijakan. Ideas Publishing. Universitas Hassanuddin.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
6. Website Indonesia National Single Window: www.insw.go.id

Author



DEWI KARTIKA D., S.E., M.SI.

Analisis Kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri yang telah berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2003. Telah menangani isu kerja sama Bilateral, Regional, Multilateral, dan saat ini menangani substansi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri & Atase Pertanian.



REYNOLD P. SITOMPUL, S.P., M.SC.

Analisis Kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri yang telah berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2009. Telah menangani substansi kerja sama Bilateral (Amerika dan Eropa) dan saat ini menangani substansi kerja sama Bilateral (Asia dan Pasifik).



KOORDINASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BIRO KLN T.A. 2023

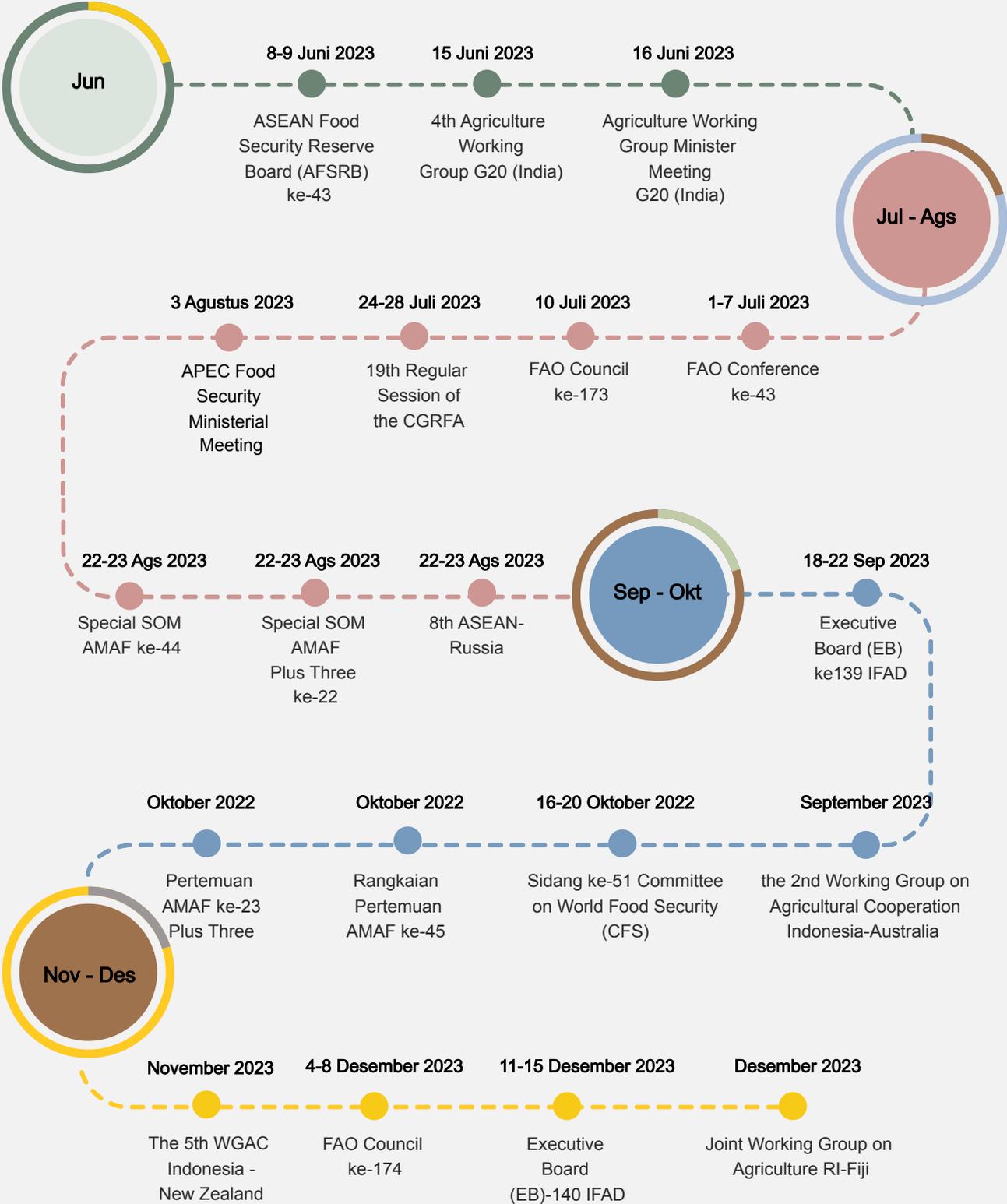
Kegiatan Koordinasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Biro Kerja Sama Luar Negeri T.A. 2022 diselenggarakan pada tanggal 24-25 Februari 2022 di Bogor. Acara SPI dibuka oleh Sekjen Kementan, Kasdi Subagyo, dan dihadiri oleh seluruh pegawai lingkup Biro KLN.

Pada acara tersebut, Sekjen memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan *Agriculture Working Group* G20 Presidensi Indonesia Tahun 2022 dan mengharapkan kesuksesan tersebut juga akan dicapai pada *Chairmanship* Indonesia pada forum ASEAN Tahun 2023. Lebih lanjut, beliau juga mendorong agar kegiatan ODICOFF (*One Day with Indonesian Coffee, Fruits, Floriculture and Food Crops*) serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan ekspor dapat diinisiasi oleh Biro KLN.



AGENDA KERJA SAMA LN

JUN - DES 2023





Tim Redaksi Buletin

Diplomasi

Biro Kerja Sama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3, Gedung A Lt. 6
Ragunan, Jaksel 12550
email: publikasi.kln@gmail.com
www.pertanian.go.id